

**LAPORAN KEUANGAN  
DINAS KESEHATAN  
T.A 2022**



**CATATAN ATAS  
LAPORAN KEUANGAN**

**PEMERINTAH KOTA  
BANJARBARU**

**2023**



**Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

---

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

Peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam bidang pengelolaan keuangan adalah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Semua proses pertanggungjawaban publik atas pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan dalam kerangka dan mekanisme pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya segala upaya peningkatan akuntabilitas harus mengacu kepada landasan hukum yang mendasarinya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Memenuhi tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang semakin kompleks, tata kelola keuangan daerah harus diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan keuangan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara normatif.

Sejalan dengan dinamika regulasi pengelolaan keuangan, diperlukan beberapa langkah antisipatif penyesuaian perangkat pengelolaan keuangan daerah menyikapi perkembangan regulasi yang ada. Tidak terbatas pada pemutakhiran dasar hukum pengelolaan, penataan kelembagaan dan pembenahan sistem dan prosedur, namun juga mencakup lingkungan sistem pengelolaan termasuk peningkatan profesionalisme dan kapabilitas sumber daya manusia di dalamnya.

Perubahan basis kas dalam pengelolaan keuangan menjadi basis akrual, secara tidak langsung merubah paradigma pencatatan akuntansi pemerintahan yang telah berjalan selama ini. Mekanisme pencatatan yang sebelumnya terbatas untuk pemenuhan kewajiban penyusunan laporan keuangan, secara bertahap disempurnakan untuk memaksimalkan hasil dari kinerja pencatatan. Hal ini terlihat dari kebijakan implementasi akuntansi yang secara bertahap dilakukan perubahan berawal dari basis kas, basis kas menuju akrual, dan kebijakan penerapan basis akrual pada tahun 2016.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan penyempurnaan sistem pengelolaan terutama terkait dengan penerapan basis akrual pada sub sistem pelaporan keuangan. Menyikapi keharusan pelaksanaan basis akrual mulai tahun 2016, Pemerintah Kota Banjarbaru mengawasi penerapannya pada tahun 2016. Serangkaian kebijakan implementasi telah ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan antara lain Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD) dan Kebijakan Akuntansi baru untuk mengakomodir perlakuan akuntansi berbasis akuntansi. SAPD adalah merupakan pedoman penuh penerapan basis akrual, sedangkan kebijakan akuntansi adalah penerapan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku berdasarkan kondisi operasional penyusunan suatu laporan keuangan.

Secara umum pemenuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP 71 tahun 2010 telah diupayakan semaksimal mungkin. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sesuai kondisi lingkungan pengelolaan, pada dasarnya adalah kebijakan pelaksanaan masa transisi yang terkait dengan sistem dan prosedur pengelolaan. Proses dan implementasi penerapan basis akrual dengan segala implikasinya diuraikan pada informasi tambahan terutama terkait dengan penyajian kembali beberapa pos dalam laporan keuangan tahun 2014 dan pelaksanaan perubahan basis akrual pada laporan keuangan tahun 2015.



# Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

Sebagai sarana informasi dan komunikasi dari mutu entitas lingkungan pengendalian intern, laporan keuangan adalah merupakan suatu bentuk penyajian informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, laporan operasional, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan. Secara spesifik

informasi tersebut tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumberdaya, tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan strategis lainnya serta menunjukkan tingkat akuntabilitas suatu entitas.

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2016 menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan pelaporan yang bermanfaat bagi para pemakai (*user*) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan cara :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;



- d. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan disusun dalam 7 bab yaitu :

- BAB I**      **Pendahuluan**
- 1.1      Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.2      Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
  - 1.3      Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
- BAB II**     **Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**
- 2.1      Ekonomi Makro
  - 2.2      Kebijakan Keuangan
  - 2.3      Pencapaian Target Kinerja APBD
- BAB III**    **Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**
- 3.1      Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
  - 3.2      Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
- BAB IV**    **Kebijakan Akuntansi**
- 4.1      Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
  - 4.2      Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan



**Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

---

- 4.3 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada Pemerintah Daerah

**BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan**

- 5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....hal.38
- 5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....hal.46
- 5.3 NERACA
- Aset Lancar.....hal.47
- Aset Tetap.....hal.55
- Aset Lainnya.....hal.63
- Kewajiban.....hal.69
- 5.4 LAPORAN OPERASIONAL.....hal.70
- 5.5 LAPORAN ARUS KAS.....hal.77
- 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....hal.78

**BAB VI Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan**

**BAB VII Penutup**



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

**2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Perkembangan kondisi umum ekonomi Kota Banjarbaru yang merupakan gambaran kinerja makro dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada beberapa tahun terakhir ini menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun pada kenyataannya perkembangan kondisi nasional tetap memberikan warna dalam menyertai dinamika perkembangan kondisi ekonomi. Hal ini nampak dari perkembangan PDRB Kota Banjarbaru dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014 sebagai berikut :

**Tabel 2.1 PDRB Kota Banjarbaru Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2014 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

Tahun	Nilai PDRB	
	Harga Berlaku (Rp)	Harga Konstan (Rp)
2010	3.475.510.000.000	3.475.510.000.000
2011	3.902.313.000.000	3.683.619.000.000
2012	4.366.554.000.000	3.924.617.000.000
2013*	4.951.498.000.000	4.182.998.000.000
2014**	5.822.747.000.000	4.461.020.000.000

Sumber Data : BPS Kota Banjarbaru

\*)Angka Perkiraan

\*\*) Angka Sementara

Berdasarkan angka perkiraan oleh BPS Kota Banjarbaru, perekonomian Kota Banjarbaru pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,65%.

Perekonomian Kota Banjarbaru dapat dilihat dari besaran PDRB, dimana selama tahun 2014 Kota Banjarbaru telah mampu menghasilkan nilai tumbuh bruto sebesar 5,82 trilyun rupiah, yang jika dilihat dengan harga konstan sekitar 4,46 trilyun rupiah. Dengan demikian pertumbuhan Kota Banjarbaru di tahun 2014 mencapai 6,65%.

Perkiraan di tahun 2014, sektor yang pertumbuhannya relatif tinggi terjadi di sektor Pengadaan Listrik dan Gas yaitu 18,74%, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda sebesar 8,32%, dan sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,02%.

Deskripsi selengkapnya tentang perkembangan kondisi ekonomi di Kota Banjarbaru dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Banjarbaru**  
**Tahun 2010-2014 (dalam persen)**

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,47	2,39	3,52	4,29	3,15
2	Pertambangan dan Penggalian	4,76	4,79	8,26	4,35	4,08
3	Industri Pengolahan	4,54	4,30	4,36	3,71	3,61



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Sektor	2010	2011	2012	2013	2014
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,07	5,64	9,67	5,22	18,74
5	Pengadaan Air	2,26	2,14	1,97	2,63	7,54
6	Konstruksi	6,06	6,17	6,88	7,30	7,68
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	5,98	6,68	7,48	7,96	8,32
8	Transportasi dan Pergudangan	6,51	7,11	9,02	7,74	7,24
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,16	4,26	4,96	5,06	6,36
10	Informasi dan Komunikasi	6,22	6,69	5,54	5,67	8,02
11	Jasa Keuangan	14,96	6,92	6,38	11,83	5,10
12	Real Estate	5,46	6,99	6,02	7,10	6,98
13	Jasa Perusahaan	4,36	7,73	5,37	7,39	7,02
14	Administrasi Pemerintahan dan Jaminan Sosial Wajib	6,98	7,63	5,96	5,83	5,55
15	Jasa Pendidikan	4,42	3,58	5,01	7,02	7,42
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,03	7,87	7,06	9,08	6,22
17	Jasa Lainnya	5,21	5,75	3,27	2,81	8,01
<b>Total PDRB</b>		<b>5,85</b>	<b>5,99</b>	<b>6,54</b>	<b>6,58</b>	<b>6,65</b>

Pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru secara umum selama periode 2010-2014 relatif stabil dalam kisaran 6%. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Banjarbaru berdasarkan harga konstan mencapai 5,85% dan meningkat menjadi 5,99% pada tahun 2011, meningkat kembali sebesar 6,54% untuk tahun 2012, meningkat kembali sebesar 6,58% untuk tahun 2013 dan selanjutnya menjadi 6,65% hingga tahun 2014.

## 2.2 Kebijakan Keuangan

Manajemen Keuangan Daerah tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) yang hakekatnya adalah salah satu alat instrumen yang dipakai sebagai tolak ukur dalam peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru, pemerintah Kota Banjarbaru menyusun suatu Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD), penyusunan anggaran yang mampu meningkatkan efektifitas penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, baik tugas umum pemerintahan maupun tugas pembangunan.

### 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Banjarbaru dalam mengusahakan penerimaan adalah mengupayakan peningkatan penerimaan PAD, sementara itu penerimaan lainnya yang bersumber dari sumbangan dan bantuan diusahakan tingkat pertumbuhannya semakin menurun. Penerimaan pemerintah Kota Banjarbaru dalam APBD terdiri dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak, bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi, bagian pinjaman Pemerintah Daerah, Bagian lain-lain penerimaan yang sah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu.



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

Pendapatan Daerah meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah.

Optimalisasi penerimaan PAD terus dilakukan yaitu upaya untuk meningkatkan penerimaan dari semua sumber PAD agar penerimaannya mendekati atau melampaui target yang telah ditetapkan berdasarkan pengkajian potensinya, yaitu dengan cara: Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Usaha Intensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah :

- a. Menginventarisir semua jenis pungutan dalam rangka pemeliharaan dan pemutahiran data Objek dan Subjek Pajak, Retribusi Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
- b. Mencermati prosedur pemberian perijinan yang sudah dilaksanakan dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama yang berpotensi dalam peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. Minimal 3 bulan sekali tim mengadakan rapat evaluasi dan memberikan masukan kepada unit kerja dalam rangka pengamanan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Usaha Ekstensifikasi pengelolaan Sumber PAD Kota Banjarbaru adalah:

- a. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan dalam rangka menginventarisir kemungkinan sumber-sumber yang potensial sebagai objek pendapatan asli daerah;
- b. Mengupayakan kerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka menjangking sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Anggaran Belanja Daerah diselenggarakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Program-program dan kegiatan-kegiatan pada pengeluaran Belanja Daerah juga bertujuan mendorong tercapainya anggaran kinerja yang terukur dengan jelas dalam implementasinya. Berdasarkan hal tersebut disusunlah Kebijakan Umum Keuangan Daerah dari Belanja Daerah Kota Banjarbaru untuk Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut :

- a. Perencanaan belanja daerah dengan menerapkan pendekatan anggaran kinerja;
- b. Pengalokasian anggaran belanja dengan menggunakan asas efisiensi dan efektivitas;
- c. Belanja tidak langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Belanja langsung disediakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atas dasar kebutuhan nyata dan dinamika yang berkembang untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan yang lebih baik berdasarkan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;



- e. Penatausahaan keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban disusun berdasarkan peraturan pemerintah yang mengatur tentang standar akuntansi pemerintahan.

Pengawasan Keuangan Daerah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Belanja Daerah Kota Banjarbaru disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja (berorientasi pada hasil) hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi anggaran dimaksud. Oleh karena itu orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja perangkat daerah. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja, pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Alokasi belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kewajiban daerah dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.

Sesuai dengan Permendagri No 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah maka struktur APBD pemerintah Kota Banjarbaru dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Struktur APBD pada sisi Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Sebelumnya Belanja APBD Kota Banjarbaru diklasifikasikan berdasarkan bidang dan sub bidang. Adapun sisi pendapatan tidak mengalami perubahan. Sejak diterbitkannya Permendagri tersebut di atas maka sisi belanja APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan yang terdiri dari Belanja Urusan Wajib dan Belanja Urusan Pilihan serta diklasifikasikan menurut fungsi.

Belanja Urusan Wajib terdiri dari :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan Umum
- d. Perumahan
- e. Penataan Ruang
- f. Perencanaan Pembangunan



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

- g. Perhubungan
- h. Lingkungan Hidup
- i. Pertanahan
- j. Kependudukan dan Catatan Sipil
- k. Pemberdayaan Perempuan
- l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
- m. Sosial
- n. Tenaga Kerja
- o. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
- p. Penanaman Modal
- q. Kebudayaan
- r. Pemuda dan Olah Raga
- s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- t. Pemerintahan Umum
- u. Ketahanan Pangan
- v. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- w. Kearsipan
- x. Komunikasi dan Informatika
- y. Perpustakaan

Adapun Belanja Urusan Pilihan terdiri dari :

- a. Pertanian
- b. Kehutanan
- c. Energi dan Sumber Daya mineral
- d. Pariwisata
- e. Perdagangan
- f. Perindustrian

Klasifikasi Belanja tersebut di atas diklasifikasikan kembali menurut organisasi. Sesuai dengan SOTK Pemerintah Kota Banjarbaru maka terjadi penggabungan beberapa urusan, ke dalam satu organisasi. Disamping itu belanja juga diklasifikasikan menurut Program dan Kegiatan, menurut kelompok belanja yang terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari :

- a. Belanja Pegawai
- b. Bunga
- c. Subsidi
- d. Hibah
- e. Bantuan Sosial
- f. Belanja Bagi Hasil
- g. Bantuan Keuangan
- h. Belanja tidak terduga



Adapun belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Dalam hal terjadi selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah maka terjadi surplus atau defisit APBD. Dalam hal terjadi surplus diutamakan untuk pembayaran pokok hutang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah lain dan atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Selanjutnya dalam hal defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

### 2.2.3 Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah meningkatkan manajemen pembiayaan daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, dan efektivitas sumber-sumber pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus, apabila APBD dalam keadaan surplus, maka kebijakan yang diambil adalah peningkatan saldo kas daerah dalam bentuk giro, deposito, penyertaan modal atau pembentukan dana cadangan untuk tujuan tertentu atau pemberian pinjaman daerah. Apabila APBD dalam keadaan defisit maka kebijakan yang dilaksanakan adalah memanfaatkan penerimaan pembiayaan secara optimal seperti Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah dan penerimaan piutang daerah.

#### 2.2.3.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai *balancing* pendapatan daerah dan belanja daerah antara lain :

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dianggarkan berdasarkan prakiraan yang rasional dengan memproyeksi kelebihan penerimaan dari pendapatan daerah dan realisasi penyerapan anggaran belanja. Penetapan besaran nilai SiLPA secara definitif setelah penetapan Peraturan daerah tentang Pelaksanaan APBD 2015 dan dilaksanakan pada perubahan APBD tahun 2015.
2. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Penerimaan pinjaman daerah dianggarkan sesuai dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui, termasuk penerimaan dari penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.
4. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pengembalian pinjaman daerah kepada pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah lainnya termasuk juga penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir (penyertaan modal daerah pada pihak ketiga).



Pada tahun anggaran 2015, penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan berasal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan kembali pemberian pinjaman.

### 2.2.3.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Tujuan tertentu sebagaimana tersebut antara lain untuk penyediaan anggaran untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya dan untuk peningkatan pendapatan daerah melalui penyertaan (investasi) pemerintah daerah serta untuk memenuhi pembayaran pokok utang yang telah sesuai dengan waktu dan besaran yang telah ditetapkan. Pengeluaran pembiayaan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan :

1. Pembentukan dana cadangan dilaksanakan melalui penetapan Peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan yang mengatur tentang tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang dibiayai dana cadangan, besaran dan rincian dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun pelaksanaan anggaran dan cadangan.
2. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penganggaran kekayaan daerah yang diinvestasikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang termasuk didalamnya investasi nirlaba yang tujuan, besaran dan rincian penyertaan modal ditetapkan melalui Peraturan Daerah.
3. Pembayaran pokok utang adalah jumlah pembayaran pokok utang yang jatuh tempo yang harus dibayar dalam tahun anggaran berjalan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
4. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan apabila kondisi dalam keadaan surplus dan diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga.

Pada tahun anggaran 2015, pengeluaran pembiayaan direncanakan pada penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Investasi ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pendapatan asli daerah (PAD) di masa yang akan datang.

Dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana terdapat di atas akan didapatkan pembiayaan netto yang merupakan kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah. Selanjutnya, kondisi surplus atau defisit dari pembiayaan daerah dihadapkan pada kondisi surplus atau defisit pada perbandingan antara pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga pada akhirnya didapatkan keseimbangan dalam APBD. Proses penganggaran pembiayaan daerah dilaksanakan dengan tidak menganggarkan hutang daerah, walaupun dalam ketentuan pemerintah daerah dapat melakukan hutang dengan mempertimbangkan masa jabatan kepala daerah.

### 2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Banjarbaru dirinci dalam rencana kinerja dan rencana anggaran. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah kegiatan pemerintah kota untuk merubah keadaan dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik dengan tingkat capaian yang terukur. Dengan telah ditetapkannya target capaian dari Rencana Kerja Pemerintah



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Daerah (RKPD) ini maka akan memudahkan dalam pengukuran kinerja. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berisikan sasaran indikator keluaran digambarkan dalam tabel berikut ini :

**Tabel 2.3 Pencapaian Target Kinerja Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
<b>DINAS KESEHATAN</b>				
<b>01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>127.654.250</b>	<b>126.743.250</b>	<b>99.29</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	41.939.000	41.605.000	99.20
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	85.715.250	85.138.250	99.33
<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>49.335.505.490</b>	<b>48.447.363.044</b>	<b>98.20</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	49.203.712.990	48.340.240.044	98.25
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	52.917.250	50.915.750	96.22
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	78.875.250	56.207.250	71.26
<b>03</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>673.682.000</b>	<b>665.007.208</b>	<b>98.71</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.279.000	24.277.200	99.99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	436.778.000	429.568.000	98.35
	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	40.000.000	39.297.750	98.24
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.880.000	2.880.000	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	169.745.000	168.984.258	99.55
<b>04</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>681.461.234</b>	<b>658.262.180</b>	<b>96.60</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	362.461.234	339.262.180	93.60
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	319.000.000	319.000.000	100.00
<b>05</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>149.643.954</b>	<b>144.132.804</b>	<b>96.32</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	20.788.000	20.323.531	97.77
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	80.100.000	75.110.404	93.77
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.850.000	14.850.000	100.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	22.655.954	22.598.869	99.75
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	11.250.000	11.250.000	100.00
<b>06</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>6.010.735.500</b>	<b>4.698.808.386</b>	<b>78.17</b>
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	662.828.000	658.531.460	99.35
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	450.597.000	419.126.330	93.02
	Pengadaan Obat, vaksin	3.719.556.750	2.666.335.084	71.68
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.177.753.750	954.815.512	81.07



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
<b>07</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>22.701.424.094</b>	<b>20.051.901.085</b>	<b>88.33</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	195.472.750	171.366.890	87.67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	57.704.250	36.306.000	62.92
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	30.102.250	22.562.250	74.95
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.810.750	53.508.250	92.56
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	75.585.750	65.950.750	87.25
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	117.522.000	100.475.000	85.49
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	49.233.250	44.525.750	90.44
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	13.954.000	12.800.000	91.73
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.329.000	13.129.000	91.63
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	22.850.000	19.150.000	83.81
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	60.000.000	59.800.000	99.67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	97.680.000	91.952.000	94.14
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	2.826.974.750	2.734.547.100	96.73
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	399.999.890	337.515.184	84.38
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	160.790.000	101.909.500	63.38
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	223.575.000	215.825.000	96.53
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	386.473.000	345.486.875	89.39
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	114.830.000	120.970.000	83.53
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	40.000.000	37.080.000	92.70
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	589.936.000	577.861.000	97.95
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	22.685.000	16.285.000	71.79
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	14.465.000	11.165.000	77.19
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	1.249.080.000	937.226.480	75.03
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	502.993.000	479.207.720	95.27
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	13.904.325.704	12.568.671.668	90.39
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	98.507.000	81.007.000	82.23
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	77.175.000	77.175.000	100.00
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	590.800.000	92.000.000	15.57
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	23.170.750	23.170.000	100.00
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	653.400.000	603.271.918	92.33
<b>08</b>	<b>Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi</b>	<b>327.249.750</b>	<b>282.369.750</b>	<b>86.29</b>
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	327.249.750	282.369.750	86.29
<b>09</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas</b>	<b>236.958.000</b>	<b>160.563.000</b>	<b>67.76</b>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	<b>C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	236.958.000	160.563.000	67.76
<b>10</b>	<b>Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>21.000.000</b>	<b>16.125.000</b>	<b>76.79</b>
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	21.000.000	16.125.000	76.79
<b>11</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>489.506.550</b>	<b>397.886.351</b>	<b>81.28</b>
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	78.000.000	60.360.000	77.38
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	411.506.550	337.526.351	82.02
<b>12</b>	<b>Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>293.180.000</b>	<b>236.922.500</b>	<b>80.81</b>
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	293.180.000	236.922.500	80.81
<b>13</b>	<b>Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</b>	<b>110.446.000</b>	<b>108.840.343</b>	<b>98.55</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90.446.000	88.840.343	98.22
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	20.000.000	20.000.000	100.00
<b>14</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi untuk Produksi Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga</b>	<b>121.390.000</b>	<b>92.990.000</b>	<b>76.60</b>
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah TAngga dan Nomor P-IRT sebagai izinProduksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi dan industry rumah tangga.	121.390.000	92.990.000	88.22
<b>15</b>	<b>Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)</b>	<b>30.130.000</b>	<b>21.220.000</b>	<b>70.43</b>
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	30.130.000	21.220.000	70.43
<b>16</b>	<b>Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada</b>	<b>101.185.000</b>	<b>79.275.000</b>	<b>78.35</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	<b>Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga</b>			
	Pemeriksaan Post Market pada produk makanan minuman industry rumah tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	101.185.000	79.275.000	78.35
<b>17</b>	<b>Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>398.541.000</b>	<b>364.313.575</b>	<b>91.41</b>
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	398.541.000	364.313.575	91.41
<b>18</b>	<b>Pelaksanaan Sehat dalam rangka promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>359.700.000</b>	<b>335.442.001</b>	<b>93.26</b>
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan hidup Bersih dan Sehat	359.700.000	335.442.001	93.26
<b>19</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>100.000.000</b>	<b>92.197.989</b>	<b>92.20</b>
	Bimbingan Teknis dan supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100.000.000	92.197.989	92.20
<b>20</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>149.209.000</b>	<b>134.366.000</b>	<b>90.05</b>
	Pengadaan Mebel	49.587.000	49.550.000	99.93
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.622.000	84.816.000	85.14

<b>PUSKESMAS BANJARBARU UTARA</b>				
No	Program	Anggaran	Realisasi	%
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>112.629.000</b>	<b>111.104.500</b>	<b>98.65</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.629.000	111.104.500	98.65
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>113.400.000</b>	<b>102.453.100</b>	<b>90.35</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.000	64.053.100	85.40
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.400.000	38.400.000	100.00
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>14.172.750</b>	<b>13.519.962</b>	<b>95.39</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14.172.750	13.519.962	95.39
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>1.302.892.429</b>	<b>1.221.195.497</b>	<b>93.73</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.302.892.429	1.221.195.497	93.73
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>558.500.000</b>	<b>489.289.000</b>	<b>87.61</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.000.000	30.500.000	98.39
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	6.800.000	6.250.000	91.91
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.450.000	3.450.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	10.600.000	9.600.000	90.57
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	13.000.000	13.000.000	100.00



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	11.920.000	11.920.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	6.500.000	5.800.000	89.23
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	206.050.000	162.229.000	78.73
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.000.000	14.900.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16.500.000	15.600.000	94.55
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	43.550.000	42.900.000	94.79
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	8.000.000	6.300.000	78.75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	1.200.000	1.000.000	83.33
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	87.300.000	87.100.000	99.77
	Operasional Pelayanan Puskesmas	88.480.000	76.490.000	86.45
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	7.400.000	2.250.000	30.41
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pemanfaatan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>190.080.000</b>	<b>190.080.000</b>	<b>100.00</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	190.080.000	190.080.000	100.00
<b>07</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.500.000</b>	<b>47.500.000</b>	<b>100.00</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	47.500.000	47.500.000	100.00

<b>PUSKESMAS LIANG ANGGANG</b>				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>91.225.500</b>	<b>91.167.500</b>	<b>99.94</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12.780.000	12.752.000	99.78
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	78.445.500	78.415.500	99.96
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>108.000.000</b>	<b>86.306.928</b>	<b>79.91</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000	47.906.928	68.83
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	38.400.000	38.400.000	100.00
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>17.717.000</b>	<b>12.923.500</b>	<b>72.94</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	17.717.000	12.923.500	72.94
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>785.081.529</b>	<b>709.083.135</b>	<b>90.32</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	785.081.529	709.083.135	90.32
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>413.114.000</b>	<b>398.984.998</b>	<b>96.58</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	33.449.000	33.449.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu	750.000	500.000	66.67



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Bersalin			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.296.000	16.296.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	9.900.000	9.900.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	1.500.000	1.000.000	66.67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	170.150.000	166.290.000	97.73
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.800.000	20.800.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	9.000.000	8.500.000	94.44
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	22.260.000	21.360.000	95.96
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	27.400.000	23.000.000	83.94
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	750.000	600.000	80.00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	31.280.000	29.830.000	95.36
	Operasional Pelayanan Puskesmas	68.829.000	67.309.998	97.79
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	750.000	150.000	20.00
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>47.400.000</b>	<b>47.400.000</b>	<b>100.00</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	47.400.000	47.400.000	100.00
<b>07</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>100.00</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	2.400.000	2.400.000	100.00

PUSKESMAS SUNGAI BESAR				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Peringkat Daerah</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000</b>	<b>100.000</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000	10.000.000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	75.000.000	100.00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.000.000	25.000.000	100.00
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>181.200.000</b>	<b>97.772.307</b>	<b>53.96</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	132.000.000	59.372.307	44.98
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.200.000	38.400.000	78.05
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>35.400.000</b>	<b>11.313.646</b>	<b>31.96</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.400.000	11.313.646	31.96
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>632.616.881</b>	<b>632.007.832</b>	<b>99.90</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	632.616.881	632.007.832	99.90
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>302.021.000</b>	<b>265.382.054</b>	<b>87.87</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	3.200.000	3.200.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.500.000	8.400.000	98.82
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.300.000	4.200.000	97.67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	2.400.000	2.300.000	95.83
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	15.300.000	14.900.000	71.86
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.000.000	15.000.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	1.200.000	1.200.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	137.849.000	109.532.054	79.46
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	5.500.000	5.300.000	96.36
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.500.000	3.500.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	3.750.000	3.750.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	4.400.000	1.200.000	27.27
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	39.622.000	35.400.000	89.34
	Operasional Pelayanan Puskesmas	57.500.000	57.500.000	100.00
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>64.830.000</b>	<b>63.600.000</b>	<b>98.10</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	64.830.000	63.600.000	98.10
<b>07</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>33.000.000</b>	<b>33.000.000</b>	<b>100.00</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	33.000.000	33.000.000	100.00

PUSKESMAS SUNGAI ULIN				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>54.496.000</b>	<b>55.536.000</b>	<b>98.30</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.846.000	4.846.000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.190.000	49.190.000	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.460.000	1.500.000	60.98
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>107.400.000</b>	<b>96.485.347</b>	<b>89.84</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	58.200.000	47.285.347	81.25
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.200.000	49.200.000	100.00
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>31.908.250</b>	<b>16.951.260</b>	<b>53.13</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	31.908.250	16.951.260	53.13
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>693.159.665</b>	<b>670.467.808</b>	<b>96.73</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	693.159.665	670.467.808	96.73
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>525.776.000</b>	<b>425.692.900</b>	<b>80.96</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	14.668.000	14.635.000	99.78
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.200.000	1.200.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	4.650.000	2.400.000	51.61
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	39.268.000	33.335.000	84.89
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	29.791.000	28.200.000	94.66
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	38.525.000	26.250.000	68.14
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	1.000.000	900.000	90.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.875.000	152.015.900	72.08
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	11.268.000	11.268.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	5.800.000	3.050.000	52.59
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	19.434.000	19.434.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	3.000.000	300.000	10.00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	88.479.000	77.555.000	87.65
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	3.050.000	2.000.000	65.57
	Operasional Pelayanan Puskesmas	54.768.000	53.150.000	97.05
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pemandangan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>79.830.000</b>	<b>78.600.000</b>	<b>98.46</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	79.830.000	78.600.000	98.46

<b>PUSKESMAS GUNTUNG PAYUNG</b>				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>153.882.000</b>	<b>149.430.000</b>	<b>97.11</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.266.000	22.266.000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	108.053.000	104.121.000	96.36
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.563.000	23.043.000	97.79
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>139.200.000</b>	<b>120.400.871</b>	<b>86.49</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90.000.000	72.100.871	80.11
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.200.000	48.300.000	98.17
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>38.120.000</b>	<b>32.935.951</b>	<b>86.40</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	38.120.000	32.935.951	86.40
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>871.888.782</b>	<b>841.809.149</b>	<b>96.55</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	871.888.782	841.809.149	96.55
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan</b>	<b>412.790.000</b>	<b>366.368.109</b>	<b>88.75</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.725.000	21.075.000	81.92
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	8.000.000	8.000.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	2.900.000	2.300.000	79.31
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	17.675.000	17.675.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	6.505.000	6.205.000	95.39
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	4.500.000	4.350.000	96.67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	1.500.000	750.000	50.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	205.687.500	172.499.000	83.86
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	10.350.000	10.100.000	97.58
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2.030.000	1.630.000	80.30
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.600.000	3.600.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	8.215.000	8.215.000	100.00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	13.575.500	13.544.109	99.75
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.400.000	2.000.000	83.33
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	46.925.000	41.225.000	87.85
	Operasional Pelayanan Puskesmas	53.200.000	53.200.000	100.00
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>135.840.000</b>	<b>130.920.000</b>	<b>96.38</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	135.840.000	130.920.000	96.38

<b>PUSKESMAS BANJARBARU SELATAN</b>				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>133.309.000</b>	<b>126.834.000</b>	<b>95.14</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	13.844.000	13.844.000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	155.533.000	109.058.000	94.40
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.932.000	3.932.000	100.00
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>101.700.000</b>	<b>81.916.258</b>	<b>80.55</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	67.200.000	57.116.258	84.99
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.500.000	24.800.000	71.88
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.700.000</b>	<b>11.884.291</b>	<b>57.41</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.700.000	11.884.291	57.41
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.043.085.525</b>	<b>1.180.541.579</b>	<b>57.78</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.043.085.525	1.180.541.579	57.78
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>619.800.000</b>	<b>526.029.930</b>	<b>84.87</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	12.000.000	11.100.000	92.50



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	11.325.000	8.175.000	72.19
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	3.900.000	3.900.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	57.100.000	53.400.000	93.52
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	32.395.000	28.635.000	88.39
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.000.000	39.000.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	6.100.000	5.300.000	86.89
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	1.000.000	1.000.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	189.501.000	125.461.000	66.21
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	35.725.000	35.725.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	24.715.000	24.715.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	12.000.000	12.000.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	16.360.000	16.360.000	100.00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	40.232.000	27.585.930	68.57
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	5.450.000	5.450.000	100.00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	79.388.000	75.588.000	95.21
	Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	-
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000	900.000	100.00
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>119.250.000</b>	<b>118.020.000</b>	<b>98.97</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	119.250.000	118.020.000	98.97
<b>07</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>35.390.000</b>	<b>20.690.000</b>	<b>58.46</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	35.390.000	20.690.000	58.46

<b>PUSKESMAS LANDASAN ULIN TIMUR</b>				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>75.000.000</b>	<b>74.817.000</b>	<b>99.76</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.000.000	74.817.000	99.76
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>179.400.000</b>	<b>159.734.952</b>	<b>89.04</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.200.000	92.534.952	82.47
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.200.000	67.200.000	100.00
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>20.620.000</b>	<b>19.907.825</b>	<b>96.55</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.620.000	19.907.825	96.55
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>506.757.490</b>	<b>375.636.150</b>	<b>74.13</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	506.757.490	375.636.150	74.13

**Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru****CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN****Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>273.230.000</b>	<b>232.498.886</b>	<b>85.09</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	8.400.000	7.650.000	91.07
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	13.000.000	13.000.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	12.250.000	11.200.000	91.43
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	1.350.000	1.350.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkolosis	4.050.000	4.050.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	600.000	600.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	172.750.000	139.118.886	80.53
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.900.000	4.900.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	10.700.000	10.700.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	9.200.000	5.800.000	63.04
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	900.000	900.000	100.00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	7.100.000	5.800.000	81.69
	Operasional Pelayanan Puskesmas	27.130.000	27.130.000	100.00
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	900.000	900.000	100.00
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>142.200.000</b>	<b>142.200.000</b>	<b>100.00</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	142.200.000	142.200.000	100.00

<b>PUSKESMAS LANDASAN ULIN</b>				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>157.095.500</b>	<b>810.739.046</b>	<b>95.35</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.216.000	26.216.000	100.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.859.500	107.554.500	93.64
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	15.000.000	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Peundang-undangan	1.020.000	1.020.000	100.00
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>121.200.000</b>	<b>87.433.746</b>	<b>72.14</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72.000.000	38.233.746	53.10
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	49.200.000	49.200.000	100.00
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0.00</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.000.000	3.000.000	0.00
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>737.000.000</b>	<b>570.514.800</b>	<b>77.41</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	737.000.000	570.514.800	77.41
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan</b>	<b>576.717.750</b>	<b>515.756.850</b>	<b>89.43</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	<b>Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	16.919.000	16.919.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	1.200.000	.1.150.000	95.83
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	9.092.000	8.092.000	89.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35.872.000	35.522.000	99.02
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	23.009.000	22.209.000	96.52
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	11.930.000	8.060.000	67.56
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	8.370.000	7.920.000	94.62
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	210.402.750	185.140.000	87.99
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	15.240.000	15.240.000	92.67
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8.327.000	4.647.000	55.81
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	15.948.000	15.948.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	23.519.000	23.044.000	97.98
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	2.200.000	1.750.000	79.55
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9.320.000	9.220.000	98.93
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.783.000	100.819.850	88.61
	Operasional Pelayanan Puskesmas	65.586.000	57.276.000	87.33
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2.100.000	900.000	42.86
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	3.900.000	1.900.000	48.72
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>99.240.000</b>	<b>95.037.500</b>	<b>95.77</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	99.240.000	95.037.500	95.77
<b>07</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>42.848.000</b>	<b>37.248.000</b>	<b>86.93</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	42.848.000	37.248.000	86.93

<b>PUSKESMAS RAWAT INAP CEMPAKA</b>				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>171.594.900</b>	<b>168.143.120</b>	<b>97.99</b>
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.244.900	13.503.900	88.58
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	141.050.000	139.967.500	99.23
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.860.000	13.231.720	95.47
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.440.000	1.440.000	100.00
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>153.000.000</b>	<b>141.082.671</b>	<b>92.21</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	11.600.000	103.682.671	92.91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.400.000	37.400.000	90.34



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>37.740.000</b>	<b>34.769.098</b>	<b>92.13</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	37.740.000	34.769.098	92.13
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>2.311.449.211</b>	<b>1.715.642.790</b>	<b>74.22</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.311.449.211	1.715.642.790	74.22
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>881.368.000</b>	<b>763.498.000</b>	<b>86.63</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.344.000	59.644.000	91.28
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	4.500.000	2.700.000	60.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6.870.000	6.870.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	22.337.000	18.737.000	83.88
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	14.441.500	14.341.500	99.31
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	8.705.000	6.300.000	72.37
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	11.100.000	10.500.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	3.725.000	3.725.000	94.59
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	22.400.000	19.250.000	85.94
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	2.400.000	2.400.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	299.952.000	286.496.500	95.51
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	82.036.000	73.486.000	89.58
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13.549.000	12.664.000	93.47
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	66.576.500	56.426.500	84.75
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	20.347.500	16.747.500	82.31
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.566.000	2.500.000	97.43
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	113.281.000	74.775.000	66.01
	Operasional Pelayanan Puskesmas	124.962.500	99.660.000	79.75
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pemandangan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>184.320.000</b>	<b>176.100.000</b>	<b>95.54</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	184.320.000	176.100.000	95.54

<b>PUSKESMAS GUNTING MANGGIS</b>				
<b>01</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>60.720.000</b>	<b>60.720.000</b>	<b>100.00</b>
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.720.000	60.720.000	100.00
<b>02</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>123.240.000</b>	<b>94.117.246</b>	<b>76.37</b>
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	80.040.000	55.717.246	69.61
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	43.200.000	38.400.000	88.89
<b>03</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah</b>	<b>26.406.450</b>	<b>21.377.311</b>	<b>80.95</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	<b>Daerah</b>			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.406.450	21.377.311	80.95
<b>04</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>701.213.319</b>	<b>670.698.568</b>	<b>95.65</b>
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	701.213.319	670.698.568	95.65
<b>05</b>	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>445.333.450</b>	<b>432.755.350</b>	<b>97.18</b>
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	26.001.000	25.801.000	99.23
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	2.500.000	2.500.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	1.341.000	1.341.000	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	16.489.000	16.339.000	99.09
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	44.096.500	44.096.500	100.00
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	142.398.700	134.694.600	94.59
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	20.377.000	20.077.000	98.53
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	8.734.000	8.210.000	94.00
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	21.903.000	21.903.000	100.00
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	4.350.000	3.500.000	80.46
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	2.400.000	2.400.000	100.00
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	53.767.250	50.917.250	94.70
	Operasional Pelayanan Puskesmas	100.976.000	100.976.000	100.00
<b>06</b>	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pemandangan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>63.900.000</b>	<b>58.010.000</b>	<b>90.78</b>
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	63.900.000	58.010.000	90.78
<b>07</b>	<b>Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>4.022.000</b>	<b>3.622.000</b>	<b>90.05</b>
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4.022.000	3.622.000	90.05



**BAB III**

**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pada Tahun Anggaran 2022, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru menganggarkan pendapatan sebesar Rp.7.833.296.784,00 dan terealisasi sebesar Rp.8.263.539.205,87 atau sebesar 105,49%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun Anggaran 2021 yang sebesar Rp.7.724.154.637,39 realisasi pendapatan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp.539.384.568,48 dari realisasi pendapatan tahun lalu.

Sementara dari sisi belanja untuk tahun anggaran 2022, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru menganggarkan sebesar Rp.102.293.809.203,00 dan terealisasi sebesar Rp.94.267.274.059 atau sebesar 92,15%. Dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran 2021 yang sebesar Rp. 124.428.105.936,92 realisasi belanja tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp.30.160.831.877,92 dari realisasi belanja tahun lalu.

**3.2 Hambatan dan Kendala Pencapaian Target Kinerja yang Telah Ditetapkan**

Salah satu kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan realisasi anggaran belanja adalah terlambatnya penetapan APBD perubahan sehingga waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan khususnya yang terkait dengan Perubahan APBD sangat terbatas yang berakibat terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan. Hal ini akan menjadi perhatian dan diharapkan dimasa yang akan datang perubahan anggaran dapat dilaksanakan lebih awal sehingga tidak mengganggu jadwal pelaksanaan kegiatan di SKPD-SKPD.



# Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

#### BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Pemerintah Kota Banjarbaru memiliki kebijakan akuntansi yang sudah ditetapkan secara formal terkait dengan perlakuan akuntansi dalam sistem pencatatan administrasi pengelolaan keuangan daerah yaitu Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

#### 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

Tanggung jawab laporan keuangan berada di pusat pimpinan entitas. Dalam aktivitas laporan keuangan, entitas dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas akuntansi dalam hal ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dengan terbitnya Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 6 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Banjarbaru resmi menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015. Agar dapat menyajikan keterbandingan laporan keuangan, Pemerintah Kota Banjarbaru perlu menyajikan kembali Neraca dan laporan Arus Kas (LAK) tahun sebelumnya.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh SKPD.

#### 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

##### 4.3.1 Pengukuran Pendapatan

Pendapatan diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan secara bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan biaya operasional atau pengeluaran). Dalam penerapannya, pendapatan dipilah menjadi 2 (dua), yakni :



1) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui setelah diterbitkan penetapan Surat Keputusan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan direalisasi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan-LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan-LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh SKPD.

### 4.3.2 Pengukuran Beban dan Belanja

Terdapat 2 (dua) definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

### 4.3.3 Pengukuran Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. Transfer masuk atau keluar diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima atau keluar di Rekening Kas Umum Daerah. Sedangkan dana transfer diukur dan dicatat berdasarkan hasil rekonsiliasi dana transfer pada akhir tahun.

### 4.3.4 Pengukuran Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah didasarkan pada nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Sedangkan untuk pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing



dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

### 4.3.5 Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat liquid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud

### 4.3.6 Pengukuran Piutang

Piutang adalah hak pemerintah daerah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain, dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan.

#### 1) Piutang Pajak / Piutang Retribusi

Piutang pajak / piutang retribusi dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak atau retribusi daerah yang pembayarannya belum diterima sampai akhir periode akuntansi.

#### 2) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Pemerintah daerah seringkali melakukan penjualan aset tetap yang dimiliki, misalnya lelang kendaraan roda 4 (empat) atau penjualan angsuran rumah dinas. Biasanya penjualan dilakukan kepada pegawai dengan cara mengangsur. Penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya dan biasanya diangsur lebih dari 12 (dua belas) bulan disebut sebagai tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang kedalam piutang jangka pendek. Reklasifikasi ini karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Reklasifikasi ini dilakukan untuk penyusunan neraca karena pembayaran atas tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo dalam kurun waktu satu tahun atau kurang diakui sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

Untuk mendapatkan saldo bagian lancar tagihan penjualan angsuran, pada saat penyusunan neraca dihitung berapa bagian dari tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam tahun depan.

#### 3) Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan Negara/Daerah, wajib mengganti kerugian tersebut. Sejumlah kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut dikenal dengan istilah Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

Bagian lancar TP/TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun TP/TGR bukan bagian lancar TP/TGR. TP/TGR yang harus diterima dalam waktu satu tahun diakui sebagai bagian lancar TP/TGR. Bagian lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal yaitu sejumlah rupiah



Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Untuk mendapatkan saldo bagian lancar TGR. Pada saat penyusunan neraca perlu dihitung berapa bagian dari TGR yang akan jatuh tempo tahun depan.

4) Piutang Lainnya

Akun piutang lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/D, Bagian lancar tuntutan perbendaharaan, bagian lancar tuntutan ganti rugi, dan piutang pajak. Piutang lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

5) Piutang Tak Tertagih

Piutang tak tertagih adalah bagian dari piutang yang tidak dapat diselesaikan pembayarannya oleh pihak ketiga. Perlakuan akuntansi terhadap piutang tak tertagih adalah dihapuskan pada tahun anggaran bersangkutan dengan mengurangi jumlah piutang dan mengurangi jumlah ekuitas dana lancar.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, oleh karenanya terhadap piutang yang diperkirakan tidak akan tertagih dilakukan penyisihan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Aset berupa piutang di neraca disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), oleh karena itu nilai piutang tidak tertagih merupakan cadangan yang harus terbentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan umur piutang. Penyisihan piutang yang didasarkan pada umur piutang dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu: Lancar, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.
- 2) Penyajian Nilai piutang tidak tertagih akan dicantumkan dalam laporan keuangan pada catatan atas laporan keuangan selama piutang pokok masih tercantum atau belum dihapuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Besarnya prosentase penyisihan piutang tidak tertagih yang didasarkan pada umur piutang ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Piutang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 5% (lima persen);
  - b. Piutang kurang lancar, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 10% (sepuluh persen);
  - c. Piutang diragukan, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 50% (lima puluh persen);
  - d. Piutang macet, nilai penyisihannya ditentukan sebesar 100% (seratus persen).
- 4) Jurnal untuk mencatat penyisihan piutang bukan merupakan beban belanja, tetapi merupakan pengurang agar nilai piutang dapat disajikan di neraca sesuai dengan nilai yang diharapkan dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 5) Penyajian penyisihan piutang di neraca merupakan unsur pengurang dari piutang yang bersangkutan.
- 6) Pemberhentian pengakuan atas piutang dapat dilakukan dengan cara:
  - a) Pelunasan (membayar tunai) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
  - b) Penghapusbukuan (*write down*)  
Penghapusbukuan piutang merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).



Kriteria penghapusbukuan adalah sebagai berikut:

- (1) Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar dari pada kerugian penghapusbukuan.
  - (2) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah, apabila perlu sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
  - (3) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan Walikota yang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku. Pengambilan keputusan penghapusbukuan dilakukan berdasarkan suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.
- c) Penghapustagihan (*write off*)

Penghapustagihan dilakukan dengan mempertimbangkan konsekuensi ekonomi, kemungkinan hilangnya hak tagih dan atau menerima tagihan. Penghapustagihan piutang harus berdasarkan kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih bagi pemerintah daerah secara hukum dan ekonomi.

Kriteria penghapustagihan sebagai berikut:

- (1) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada Negara.
  - (2) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik.
  - (3) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
  - (4) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang.
  - (5) Penghapustagihan setelah cara penagihan gagal atau tidak mungkin diterapkan.
  - (6) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya hukum kepailitan, hukum industri, hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di Negara lain.
- d) Penerimaan Tunai Atas Piutang Yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata dikemudian hari diterima pembayaran/pelunasan, maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau pembiayaan tergantung dari jenis piutang.

- e) Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah upaya perbaikan yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang meliputi pemberian keringanan hutang, persetujuan angsuran atau persetujuan penundaan pembayaran.

### 4.3.7 Pengukuran Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Metode pencatatan persediaan dilakukan secara Periodik. Pengukuran persediaan pada saat periode Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventaris dengan menggunakan harga terakhir pada Dinas Kesehatan menggunakan harga perolehan.

Pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi sebesar jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit biaya perolehannya. Dalam hal terjadi selisih antara catatan persediaan dan hasil stock opname yang disebabkan karena persediaan usang, kadaluarsa atau rusak maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai beban, sedangkan jika dikarenakan persediaan hilang maka selisih persediaan dapat diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila Diperoleh dengan Pembelian

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- 2) Harga pokok produksi apabila Diperoleh dengan Memproduksi Sendiri

Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

### 4.3.8 Pengukuran Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalty atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

- 1) Pengukuran Investasi dilakukan berdasarkan:

- a) Dicatat Sebesar Nilai Perolehan

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga misalnya saham dan obligasi jangka pendek dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga investasi itu sendiri ditambah biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar biaya perolehannya.



b) Dicatat Sebesar Nilai Wajar

Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah adalah sebesar nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal nilai perolehannya yaitu sebesar harga pasar.

c) Dicatat Sebesar Nilai Nominal

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

d) Dicatat Sebesar Nilai Tercatat atau Nilai Wajar Lainnya

Investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal diproyek-proyek pembangunan Pemerintah dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan kepada pihak ketiga.

2) Penilaian Investasi Pemerintah daerah dilakukan dengan 3 metode yaitu:

a) Metode Biaya

Metode Biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi sebesar biaya perolehan. Metode ini digunakan pada investasi dengan kepemilikan kurang 20%.

b) Metode Ekuitas

Metode Ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari Badan Usaha Penerima Investasi yang terjadi sesudah perolehan awal investasi. Metode ini digunakan pada kepemilikan lebih dari 20% atau kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan (*Net Realizable Value*) digunakan jika kepemilikan investasi pemerintah bersifat Non Permanen-Dana bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, dilakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat dineraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Penyajian dana bergulir dineraca dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.



### 4.3.9 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai Aset Tetap diukur dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua sewa lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 3) Kapitalisasi Aset, Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap digunakan untuk menentukan nilai perolehan minimum suatu aset yang harus dikapitalisasi.

### 4.3.10 Penyusutan Aset Tetap

Aset Tetap merupakan komponen aset operasi Pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintah. Aset tetap memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatnya. Oleh karena itu informasi tentang nilai aset tetap harus disajikan secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset. Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan yang terkait dalam pengelolaan aset tetap adalah nilai wajar aset. Penyajian wajar atas nilai aset tetap dapat dipenuhi melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan Depreciable assets selama masa manfaat aset yang bersangkutan dan masih dipergunakan.

Nilai penyusutan untuk masing masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus / *straight line method* dihitung masing-masing sesuai realisasi belanja tahun pengeluaran dimulai pada tahun pengeluaran+1.

### 4.3.11 Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan, yang meliputi:

1. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
2. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan umumnya dan dapat dialokasikan kekonstruksi tersebut; dan
3. Biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.



### 4.3.12 Pengukuran Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan yang memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis bagi pemerintah daerah kerana mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial potential service di masa depan.

Aset lainnya dibagi dalam empat kelompok yaitu :

1. Tagihan Jangka Panjang
  - a. Tagihan Penjualan Angsuran, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian daerah, diukur sebesar Nilai Nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah.
2. Kemitraan dengan pihak ketiga
  - a. Sewa, diukur sebesar nilai nominal dari kontrak / berita secara sewa aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan KSP, diukur sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian.
  - c. Bangunan Guna Serah/BOT, diukur sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga /investor untuk membangun set tersebut. yang tercatat.
  - d. Bangunan serah guna/BTO, diukur sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeuarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

#### 3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

ATB diukur dengan harga perolehannya. Terhadap ATB dilakukan amortisasi kecuali atas ATB yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaat. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode dengan metode garis lurus. Untuk ATB berupa piranti lunak Software jika tidak diketahui adanya masa manfaat terkait masa operasionalnya, maka masa manfaatnya ditetapkan selama 5 tahun.

4. Aset Lain-Lain, adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

### 4.3.13 Pengukuran Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Perlakuan akuntansi terhadap akun kewajiban adalah sebagai berikut:

1. Kewajiban diukur dengan nilai nominal mata uang rupiah yang harus dibayar kembali. Kewajiban yang diukur dalam mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
2. Biaya perolehan atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi



pembayaran, perubahan penilaiannya dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut, Penggunaan Nilai Nominal dalam nilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

3. Akun Kewajiban diklasifikasikan menjadi:
  - a. Kewajiban jangka pendek, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo dalam suatu periode akuntansi, meliputi bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga dan utang perhitungan pihak ketiga.
  - b. Kewajiban jangka panjang, merupakan utang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi, meliputi pinjaman utang perbankan dan utang jangka panjang lainnya.

#### 4.3.14 Pengukuran Ekuitas

Akun ini terdiri dari :

1. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Saldo Ekuitas pada tanggal laporan berasal dari Ekuitas awal ditambah/dikurang oleh Surplus/Deposito LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset tetap, dan lain-lain.
2. Ekuitas SAL

Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup Antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Deposito – LRA.
3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat reciprocal account untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup Rekening Koran PPKD/SKPD.

#### 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

##### 4.4.1 Koreksi Kesalahan

Koreksi Kesalahan atas penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kesalahan tidak berulang
  - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, dilakukan dengan melakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.
  - b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Apabila kesalahan terjadi pada periode sebelumnya namun belum diterbitkan laporan keuangan, maka cukup dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan, akan tetapi, jika kesalahan baru ditemukan setelah diterbitkan laporan keuangan, maka perlakuannya adalah sebagai berikut:

    - Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja yang mengakibatkan penambahan kas, dilakukan dengan pembetulan pada akun Pendapatan lain-lain LRA.



Sedangkan apabila mengakibatkan pengurangan kas, maka dilakukan pembetulan pada akun Saldo Anggaran lebih.

- Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan baik menambah atau mengurangi posisi kas, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Ekuitas.

### 2. Kesalahan Berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah/normal dari jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Kesalahan jenis ini tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA, maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

#### 4.4.2 Penyajian Kembali (Restatement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu untuk mengetahui kecenderungan arah *trend* posisi keuangan, Kinerja dan arus kas. Oleh karena itu kebijakan akuntansi yang diterapkan secara konsisten pada setiap periode. Apabila terdapat perubahan didalam perlakuan, pengakuan atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode dan estimasi, maka perubahan kebijakan akuntansi disajikan pada laporan keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Terkait penyajian laporan keuangan pemerintah daerah terdapat dua hal pokok dalam tahapan pelaksanaannya yaitu:

1. Melakukan perhitungan ulang terhadap akun yang mengalami perubahan untuk menentukan nilai buku pada periode pembenahan sesuai perubahan kebijakan akuntansi
2. Menyajikan Laporan keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang baru untuk semua periode yang dilaporkan dan mengungkapkan perbedaan yang terjadi antara laporan keuangan baru dibandingkan dengan laporan keuangan yang telah diterbitkan sebelumnya.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran merupakan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya pada satu tahun anggaran, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

**5.1.1 Pendapatan**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>8.263.539.205,87</b>	<b>7.724.154.637,39</b>

Pendapatan Dinas Kesehatan pada Tahun 2022 sebesar Rp8.263.539.205,87, sedangkan pendapatan Dinas Kesehatan pada Tahun 2021 sebesar Rp.7.724.154.637,39 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.539.384.568,48 atau 105,49%.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 dan 2020**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	7.833.296.784,00	8.263.539.205,87	105,49	7.724.154.637,39
<b>TOTAL</b>		<b>7.833.296.784,00</b>	<b>8.263.539.205,87</b>	<b>105,49</b>	<b>7.724.154.637,39</b>

Berikut ini rincian Pendapatan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 yang terdiri dari pendapatan retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah :

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>8.263.539.205,87</b>	<b>7.724.154.637,39</b>

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Retribusi Daerah	25.000.000,00	0,00	0,00
2	Lain-Lain PAD yang Sah	7.808.296.784,00	8.263.539.205,87	105,49
<b>TOTAL</b>		<b>7.833.296.784,00</b>	<b>8.263.539.205,87</b>	<b>105,49</b>

**5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>13.115.500,00</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Pendapatan Retribusi Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2022 sebesar Rp 0,00 atau tidak ada realisasi karena adanya perubahan status Puskesmas Landasan Ulin Timur menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

**Tabel Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.1.1.1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

0,00

13.115.500,00

Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dengan anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 tidak ada realisasi, sebab anggaran ini dientry sebelum awal tahun 2022 disaat Puskesmas Landasan Ulin Timur belum berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Per tanggal 1 Januari 2022 Puskesmas Landasan Ulin Timur telah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sehingga dana retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas tidak dapat teralisasi. Ketika terjadi pergeseran, anggaran retribusi daerah tersebut belum terhapus hingga akhir tahun, sehingga dana retribusi masih masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran.

**Tabel Anggaran dan Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan**

No	Uraian	Anggaran TA 2022	Realisasi TA 2022
		(Rp)	(Rp)
1	Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	25.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>25.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.1.1.2 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

8.263.539.205,87

7.711.039.137,39

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 sebesar Rp.8.263.539.205,87, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp.7.711.039.137,39 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.552.500.068,48 yaitu 105,83%.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

**Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Pendapatan BLUD	7.808.296.784,00	8.263.539.205,87
<b>TOTAL</b>		<b>7.808.296.784,00</b>	<b>8.263.539.205,87</b>

**Rincian Pendapatan BLUD sebagai berikut:**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Puskesmas Liang Anggang	516.492.534,00	529.585.276,11
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	920.000.000,00	1.179.903.064,79
3	Puskesmas Sungai Besar	516.000.000,00	545.422.786,84
4	Puskesmas Sungai Ulin	555.000.000,00	625.169.181,85
5	Puskesmas Guntung Payung	643.200.000,00	721.359.960,14
6	Puskesmas Banjarbaru Selatan	1.394.000.000,00	1.030.316.173,02
7	Puskesmas Landasan Ulin Timur	265.215.000,00	396.753.500,00
8	Puskesmas Landasan Ulin	737.000.000,00	872.858.130,28
9	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	1.671.389.250,00	1.607.321.735,00
10	Puskesmas Guntung Manggis	590.000.000,00	754.849.397,84
<b>TOTAL</b>		<b>7.808.296.784,00</b>	<b>8.263.539.205,87</b>

## 5.1.2 Belanja

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**94.267.274.059,00**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**124.428.105.936,92**

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja tahun 2022 dan 2021**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%	Realisasi TA 2021 (Rp)
1	Belanja Operasi	99.668.268.765,00	92.142.954.495,00	92,45	106.598.961.503,92
2	Belanja Modal	2.625.540.438,00	2.124.319.564,00	80,91	17.829.144.433,00
<b>TOTAL</b>		<b>102.293.809.203,00</b>	<b>94.267.274.059,00</b>	<b>92,15</b>	<b>124.428.105.936,92</b>

Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 menurun dari tahun sebelumnya. Jumlah belanja daerah pada tahun 2022 sebesar Rp.94.267.274.059,00, sedangkan pada tahun 2021 sebesar Rp.124.428.105.936,92 atau menurun sebesar Rp.30.160.831.877,92. Berikut ini rincian belanja daerah Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 :

### 5.1.2.1 Belanja Operasi

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**92.142.954.495,00**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**106.598.991.503,92**



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	49.536.989.557,00	48.517.995.657,00	97,94
2	Belanja Barang dan Jasa	50.131.279.208,00	43.624.958.838,00	87,02
<b>TOTAL</b>		<b>99.668.268.765,00</b>	<b>92.142.954.495,00</b>	<b>92,45</b>

Rincian masing-masing jenis Belanja Operasi tersebut diuraikan sebagai berikut :

### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Total belanja pegawai Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 sebesar Rp.48.517.995.657,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	33.467.229.770,00	33.139.905.188,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	15.735.233.220,00	15.143.071.094,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	39.590.000,00	25.070.000,00
4	Belanja Pegawai BLUD	294.936.567,00	209.949.375,00
<b>TOTAL</b>		<b>49.536.989.557,00</b>	<b>48.517.995.657,00</b>

### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun 2022 sebesar Rp.43.624.958.838,00 yang terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dan Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pada belanja jasa tenaga ahli terdapat uang sebesar Rp.10.500.000,00, saldo ini merupakan pengembalian kelebihan bayar insentif PIDI tahun 2022 yang baru dibayarkan pada 8 Februari 2023. Sehingga saldo belanja jasa tenaga ahli masih kelebihan sebesar Rp.10.500.000,00, namun fisik uang kelebihan bayar tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah. Berikut ini rincian belanja barang dan jasa Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Barang	12.056.436.418,00	10.288.890.554,00
2	Belanja Jasa	24.179.002.238,00	21.583.078.342,00
3	Belanja Pemeliharaan	248.195.954,00	229.560.469,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	4.251.209.772,00	3.411.470.759,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	55.600.000,00	20.600.000,00



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

6	Belanja Barang dan Jasa BLUD	9.340.834.826,00	8.091.358.714,00
<b>TOTAL</b>		<b>50.131.279.208,00</b>	<b>43.624.958.838,00</b>

### 5.1.2.2 Belanja Modal

31 Desember 2022

(Rp)

**2.124.319.564,00**

31 Desember 2021

(Rp)

**17.829.144.433,00**

Belanja Modal Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 sebesar Rp2.124.319.564,00 yang terdiri dari Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	2.263.617.034,00	1.812.980.222,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	311.923.404,00	311.339.342,00
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.625.540.438,00</b>	<b>2.124.319.564,00</b>

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Konsolidasi:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	63.087.000,00	61.640.000,00
2	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.782.761.034,00	1.347.874.161,00
3	Belanja Modal Alat Laboratorium	97.000,00	0,00
4	Belanja Modal Komputer	267.672.000,00	253.866.061,00
5	Belanja Modal Peralatan Olahraga	150.000.000,00	149.600.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.263.617.034,00</b>	<b>1.812.980.222,00</b>

Berikut ini Tabel Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	63.087.000,00	61.640.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	0,00	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00	0,00



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>63.087.000,00</b>	<b>61.640.000,00</b>

Berikut ini Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Alat Kedokteran dan Kesehatan:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	791.425.000,00	760.458.930,00
2	Puskesmas Liang Anggang	41.960.000,00	21.759.171,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	53.994.000,00	46.337.217,00
4	Puskesmas Sungai Besar	59.481.269,00	59.481.269,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	30.000.000,00	29.082.695,00
6	Puskesmas Guntung Payung	8.924.765,00	8.924.765,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	386.035.000,00	77.842.000,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	19.000.000,00	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	172.941.000,00	161.207.400,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	170.500.000,00	134.651.424,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	48.500.000,00	48.129.290,00
<b>TOTAL</b>		<b>1.782.761.034,00</b>	<b>1.347.874.161,00</b>

Berikut ini Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Alat Laboratorium:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	97.000,00	0,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	0,00	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>97.000,00</b>	<b>0,00</b>

Berikut ini Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Komputer:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	267.672.000,00	253.866.061,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	0,00	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00	0,00

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>267.672.000,00</b>	<b>253.866.061,00</b>

Berikut ini Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan Olahraga:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	150.000.000,00	149.600.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	0,00	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>150.000.000,00</b>	<b>149.600.000,00</b>

**5.1.2.2.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 sebesar Rp.311.339.342,00 yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung dan Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	251.923.404,00	251.632.442,00
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	60.000.000,00	59.706.900,00
<b>TOTAL</b>		<b>311.923.404,00</b>	<b>311.339.342,00</b>

Berikut ini Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Bangunan Gedung:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	0,00	0,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	135.000.000,00	134.958.000,00
4	Puskesmas Sungai Besar	29.599.442,00	29.599.442,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	26.848.962,00	26.600.000,00
6	Puskesmas Guntung Payung	15.475.000,00	15.475.000,00



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	45.000.000,00	45.000.000,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>251.923.404,00</b>	<b>251.632.442,00</b>

Berikut ini Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti:

No	Uraian	Anggaran TA 2022 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	59.706.900,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	0,00	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>60.000.000,00</b>	<b>59.706.900,00</b>

### 5.1.3 Surplus/Defisit-LRA

31 Desember 2022

(Rp)

(86.003.734.853,13)

31 Desember 2021

(Rp)

(116.703.951.299,53)

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 bernilai defisit disebabkan oleh nilai pendapatan sebesar Rp.8.263.539.205,87 lebih kecil dibandingkan belanja sebesar Rp.94.267.274.059,00 sehingga didapatkan defisit sebesar Rp.86.003.734.853,13.

### 5.1.4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA)

31 Desember 2022

(Rp)

(86.003.734.853,13)

31 Desember 2021

(Rp)

(116.703.951.299,53)

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran merupakan angka yang didapatkan dari surplus/defisit-LRA yaitu sebesar Rp.86.003.734.853,13.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

**5.2 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**5.2.1 Saldo Anggaran lebih Awal**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.2.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**5.1 NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru atas aset, kewajiban, dan ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Aset Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.101.044.242.526,58 dan Rp.107.050.221.787,22. Saldo Aset per 31 Desember 2022 turun sebesar Rp.6.005.979.260,64 dari Saldo Aset per 31 Desember 2021. Penjelasan dari unsur-unsur Aset sebagai berikut:

**5.3.1 Aset Lancar**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>9.695.608.021,36</b>	<b>12.264.922.859,49</b>

Aset lancar Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp. 9.695.608.021,36 dan Rp.12.264.922.859,49, menurun dibandingkan jumlah aset lancar pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp 2.569.314.838,13. Berikut ini rincian aset lancar:

No	Uraian	Realisasi TA 2022 (Rp)
1	Kas Di Bendahara Pengeluaran	10.500.000,00
2	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	2.200.215.963,36
3	Persediaan	7.484.892.058,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.695.608.021,36</b>

**5.3.1.1 Kas Di Bendahara Penerimaan**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**5.3.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

Sisa kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.10.500.000,00, saldo ini merupakan pengembalian kelebihan bayar insentif PIDI tahun 2022 yang baru dibayarkan pada 8 Februari 2023. Sehingga saldo kas di Bendahara Pengeluaran masih tersisa sebesar Rp.10.500.000,00, namun fisik uang kelebihan bayar tersebut sudah dikembalikan ke Kas Daerah.



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

### 5.3.1.3 Kas Di Bendahara BLUD

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>2.200.215.963,36</u>	<u>2.875.237.629,49</u>

Kas Di Bendahara BLUD merupakan jumlah kas yang terdapat di bendahara BLUD Puskesmas dengan total kas sebesar Rp.2.200.215.963,36 dengan rincian sebagai berikut:

#### Rincian Kas Di Bendahara BLUD sebagai berikut:

1. Puskesmas Liang Anggang	Rp. 89.088.236,24
2. Puskesmas Banjarbaru Utara	Rp. 345.242.249,07
3. Puskesmas Sungai Besar	Rp. 30.031.836,13
4. Puskesmas Sungai Ulin	Rp. 93.113.465,15
5. Puskesmas Guntung Payung	Rp. 108.239.593,86
6. Puskesmas Banjarbaru Selatan	Rp. 498.860.119,99
7. Puskesmas Landasan Ulin Timur	Rp. 179.327.745,00
8. Puskesmas Landasan Ulin	Rp. 129.209.662,70
9. Puskesmas Rawat Inap Cempaka	Rp. 531.738.906,00
10. <u>Puskesmas Guntung Manggis</u>	<u>Rp. 195.364.149,22</u>
<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 2.200.215.963,36</b>

### 5.3.1.4 Kas di Bendahara FKTP

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>241.687.490,00</u>

### 5.3.1.5 Piutang Lainnya

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

### 5.3.1.6 Persediaan

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<u>7.484.892.058,00</u>	<u>9.147.997.740,00</u>

Persediaan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 sebesar Rp.7.484.892.058,00 terdiri dari lima belas item persediaan dengan rincian sebagai berikut:



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian persediaan	Total
1	Alat Tulis Kantor	31.306.450,00
2	Alat Listrik	2.051.900,00
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	32.411.400,00
4	Perabot Kantor	3.153.500,00
5	Bahan Komputer	16.964.000,00
6	Bahan Cetak	43.766.300,00
7	Suku Cadang Alat Kedokteran	642.366.350,00
8	Bahan Kimia	65.840.930,00
9	Obat-obatan Lainnya	2.767.334.589,00
10	Obat	3.846.683.639,00
11	Benda Pos	2.320.000,00
12	Pakaian Kerja Laboratorium/Bahan Lainnya	25.901.000,00
13	Persediaan untuk dijual/Diserahkan-Persediaan untuk dijual/Diserahkan kepada masyarakat	4.792.000,00
<b>Total</b>		<b>7.484.892.058,00</b>

Berikut rincian Persediaan Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Sisa Persediaan (Rp)
1	Dinas Kesehatan	542.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	1.674.500,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	600.000,00
4	Puskesmas Sungai Besar	1.347.000,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	2.042.550,00
6	Puskesmas Guntung Payung	1.147.500,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	9.809.900,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	882.000,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	806.000,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	12.455.000,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>31.306.450,00</b>

Berikut rincian Persediaan Alat Listrik Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	60.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	988.000,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	193.900,00
6	Puskesmas Guntung Payung	500.000,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	270.000,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	40.000,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>2.051.900,00</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut rincian Persediaan Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	20.888.400,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	3.085.000,00
6	Puskesmas Guntung Payung	100.000,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	7.278.000,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	1.060.000,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>32.411.400,00</b>

Berikut rincian Persediaan Perabot Kantor Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	355.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	359.000,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	147.500,00
6	Puskesmas Guntung Payung	680.000,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	1.276.000,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	336.000,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>3.153.500,00</b>

Berikut rincian Persediaan Bahan Komputer Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	5.450.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	820.000,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	955.000,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	4.897.000,00
6	Puskesmas Guntung Payung	4.632.000,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	210.000,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>16.964.000,00</b>

Berikut rincian Persediaan Bahan Cetak Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	20.730.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	175.000,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	1.925.000,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	14.410.300,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	5.779.000,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	747.000,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	0,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>43.766.300,00</b>

Berikut rincian Persediaan Suku Cadang Alat Kedokteran Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	594.618.550,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	25.596.160,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	5.181.114,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	4.111.226,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	2.599.300,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	10.260.000,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>642.366.350,00</b>

Berikut rincian Persediaan Bahan Kimia Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	45.765.275,00
2	Puskesmas Liang Anggang	234.175,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	5.440.915,00
6	Puskesmas Guntung Payung	
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	8.651.290,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	5.749.275,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>65.840.930,00</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut rincian Persediaan Obat-Obatan Lainnya Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	2.362.229.975,00
2	Puskesmas Liang Anggang	33.408.771,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	7.929.631,00
4	Puskesmas Sungai Besar	37.832.673,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	114.738.866,00
6	Puskesmas Guntung Payung	12.576.181,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	37.281.733,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	31.118.967,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	15.300.099,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	104.520.215,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	10.397.478,00
<b>Total</b>		<b>2.767.334.589,00</b>

Berikut rincian Persediaan Obat Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	2.575.228.682,00
2	Puskesmas Liang Anggang	120.003.400,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	112.642.031,00
4	Puskesmas Sungai Besar	135.572.859,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	118.472.843,00
6	Puskesmas Guntung Payung	70.250.454,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	130.111.682,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	108.734.223,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	133.121.744,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	187.005.681,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	155.540.040,00
<b>Total</b>		<b>3.846.683.639,00</b>

Berikut rincian Persediaan Benda Pos Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	0,00
2	Puskesmas Liang Anggang	760.000,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	90.000,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	390.000,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	950.000,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	130.000,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>2.320.000,00</b>



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Berikut rincian Persediaan Pakaian Kerja Laboratorium/Bahan Lainnya Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	3.441.000,00
2	Puskesmas Liang Anggang	270.000,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	21.220.000,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	970.000,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>25.901.000,00</b>

Berikut rincian Persediaan untuk dijual/diserahkan – Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru dan Puskesmas :

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan	0,00
2	Puskesmas Liang Anggang	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	0,00
5	Puskesmas Sungai Ulin	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	0,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00
8	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00
9	Puskesmas Landasan Ulin	0,00
10	Puskesmas Rawat Inap Cempaka	4.792.000,00
11	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
<b>Total</b>		<b>4.792.000,00</b>

Pada kertas kerja persediaan, terdapat persediaan yang telah expire date, berikut ini rincian data persediaan yang telah expire date dengan total sebesar Rp.498.699.627,00 pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

No	Uraian	Total
1	Dinas Kesehatan :	
	- Suku Cadang Alat Kedokteran	27.126.920,00
	- Obat-obatan lainnya	25.654.000,00
	- Obat	244.182.444,00
2	Puskesmas Liang Anggang :	
	- Obat	28.377.250,00
3	Puskesmas Banjarbaru Utara :	
	- Obat-obatan lainnya	1.438.395,00
	- Obat	50.770.218,00
4	Puskesmas Sungai Besar :	
	- Obat-obatan lainnya	1.477.050,00



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

	- Obat	19.666.241,00
5	Puskesmas Sungai Ulin :	
	- Obat-obatan lainnya	549.600,00
	- Obat	48.285.262,00
6	Puskesmas Guntung Payung :	
	- Obat	20.412.904,00
7	Puskesmas Banjarbaru Selatan :	
	- Obat	2.628.900,00
8	Puskesmas Guntung Manggis :	
	- Obat	28.130.443,00
<b>Total</b>		<b>498.699.627,00</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5.1 Aset Tetap

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
<b>90.486.730.264,22</b>	<b>94.701.943.449,46</b>

Saldo Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp.90.486.730.264,22 dan 94.701.943.449,46. Saldo aset tetap menurun dari tahun 2021 karena adanya aktivitas mutasi keluar, mutasi masuk, reklasifikasi aset tetap dan penyusutan aset tetap. Aset tetap terdiri dari aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya serta akumulasi penyusutan. Berikut rincian Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru:

Komponen Aset Tetap	Tahun 2022	Tahun 2021
Tanah	23.796.497.537,00	23.696.497.537,00
Peralatan dan Mesin	55.191.551.260,35	53.792.883.236,40
Gedung dan Bangunan	70.338.958.003,30	69.704.954.739,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.839.243.823,00	1.839.243.823,00
Aset Tetap Lainnya	784.329.999,96	784.329.999,96
Akumulasi penyusutan	(61.372.607.859,39)	(55.115.965.886,20)
<b>Aset Tetap</b>	<b>90.577.972.764,22</b>	<b>94.701.943.449,46</b>

No.	URAIAN	TANAH	PERALATAN DAN MESIN	GEDUNG DAN BANGUNAN	JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	ASET TETAP LAINNYA	KDP
1	Dinas Kesehatan	11.189.322.157,00	10.907.326.406,08	10.498.630.000,00	533.036.000,00	533.036.000,00	0,00
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	319.410.000,00	4.576.519.173,00	2.296.619.788,00	22.113.322,00	39.764.444,44	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	219.000.000,00	4.780.561.619,12	179.813.960,00	52.715.275,00	39.764.444,44	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	4.991.442.000,00	3.830.221.976,05	8.692.029.343,00	22.113.322,00	224.854.444,44	0,00
5	Puskesmas Cempaka	3.234.315.180,00	6.040.700.962,25	12.110.266.115,30	102.447.571,00	44.714.444,44	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	449.845.000,00	4.181.562.052,67	8.985.744.847,00	71.343.322,00	226.794.444,44	0,00
7	Puskesmas Landasan Ulin	1.569.750.000,00	3.651.611.151,59	2.857.926.235,00	128.864.122,00	39.714.444,44	0,00
8	Puskesmas Liang Anggang	38.000.000,00	5.091.640.187,93	7.683.301.092,00	447.898.222,00	8.944.444,44	0,00
9	Puskesmas Sungai Ulin	410.200.000,00	4.441.630.993,72	3.588.401.701,00	180.989.345,00	39.764.444,44	0,00
10	Puskesmas Guntung Manggis	0,00	4.340.591.936,25	4.896.094.298,00	83.313.322,00	3.944.444,44	0,00
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	1.375.213.200,00	3.281.022.101,69	8.550.130.624,00	194.410.000,00	116.070.000,00	0,00



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.3.1 Tanah

31 Desember 2022

31 Desember 2021

(Rp)

(Rp)

**23.796.497.537,00**

**23.696.497.537,00**

No.	URAIAN	TANAH
1	Dinas Kesehatan	11.189.322.157,00
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	319.410.000,00
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	219.000.000,00
4	Puskesmas Sungai Besar	4.991.442.000,00
5	Puskesmas Cempaka	3.234.315.180,00
6	Puskesmas Guntung Payung	449.845.000,00
7	Puskesmas Landasan Ulin	1.569.750.000,00
8	Puskesmas Liang Anggang	38.000.000,00
9	Puskesmas Sungai Ulin	410.200.000,00
10	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
11	Puskesmas Landasan Ulin timur	1.375.213.200,00

A. Koreksi Kurang Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun 2022 sebesar Rp. 0,00

B. Penambahan total Atas Saldo Aset Tetap-Tanah Tahun 2022 sebesar Rp. 100.000.000,00

C. Rincian pergerakan Aset Tetap-Tanah sebagai berikut :

- **Dinas Kesehatan** Aset tetap - Tanah Rp. 11.189.322.157
- **Puskesmas Banjarbaru Utara** Aset tetap - Tanah Rp. 319.410.000,00
- **Puskesmas Banjarbaru Selatan** Aset tetap - Tanah Rp. 219.000.000,00
- **Puskesmas Sungai Besar** Aset tetap - Tanah Rp. 4.991.442.000,00
- **Puskesmas Cempaka** Aset tetap - Tanah Rp. 3.234.315.180,00
- **Puskesmas Guntung Payung** Aset tetap - Tanah Rp. 449.845.000,00
- **Puskesmas Landasan Ulin** Aset tetap - Tanah Rp. 1.569.750.000,00
- **Puskesmas Liang Anggang** Aset tetap - Tanah Rp. 38.000.000,00
- **Puskesmas Sungai Ulin** saldo awal Rp. 310.200.000,00 ada penambahan karena hibah sebesar Rp. 100.000.000,00 sehingga saldo akhir Tanah Rp. 410.200.000,00
- **Puskesmas Guntung Manggis** tetap Rp.0,00
- **Puskesmas Landasan Ulin Timur** Aset tetap - Tanah Rp.1.375.213.200,00

D. Pengurangan terhadap Aset Tetap-Tanah tahun 2022 sebesar Rp. 0,0



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5.3.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022  
(Rp)  
55.191.551.260,35

31 Desember 2021  
(Rp)  
53.792.883.236,40

No.	URAIAN	PERALATAN DAN MESIN
1	Dinas Kesehatan	10.907.326.406,08
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	4.576.519.173,00
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	4.780.561.619,12
4	Puskesmas Sungai Besar	3.830.221.976,05
5	Puskesmas Cempaka	6.040.700.962,25
6	Puskesmas Guntung Payung	4.181.562.052,67
7	Puskesmas Landasan Ulin	3.651.611.151,59
8	Puskesmas Liang Anggang	5.091.640.187,93
9	Puskesmas Sungai Ulin	4.441.630.993,72
10	Puskesmas Guntung Manggis	4.340.591.936,25
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	3.281.022.101,69

A. Penambahan Atas Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Tahun 2022 sebesar Rp. 1.398.668.023,95

B. Rincian Pergerakan aset tetap Peralatan Mesin sebagai berikut :

- **Dinas Kesehatan** saldo awal Rp. 10.418.108.345,08 ada Penambahan sebesar Rp. 1.325.564.991,00 dari Belanja Modal Rp. 1.225.564.991,00 dan Mutasi Masuk sebesar Rp. 100.000.000,00, dan pengurangan sebesar Rp. 836.346.930,00 dari Barang Bukan Aset sebesar Rp. 19.500.000,00, Mutasi Keluar sebesar Rp. 816.846.930,00 sehingga Saldo Akhir Peralatan Mesin sebesar Rp. 10.907.326.406,08
- **Puskesmas Banjarbaru Utara** saldo awal Rp. 4.323.493.976,00 ada Penambahan sebesar Rp. 257.404.258,00 dari Belanja Modal Rp. 46.337.217,00 dan Mutasi Masuk sebesar Rp. 211.067.041,00 dan ada Pengurangan sebesar Rp. 4.379.061,00 dari Barang Bukan Aset, sehingga Saldo Akhir Peralatan Mesin sebesar Rp. 4.576.519.173,00
- **Puskesmas Banjarbaru Selatan** saldo awal Rp. 4.697.484.819,12 ada Penambahan sebesar Rp. 113.954.861,00 dari Belanja Modal Rp. 77.842.000,00, Reklas Belanja Persediaan sebesar Rp. 5.545.000,00 dan Mutasi Masuk sebesar Rp. 30.567.861,00 serta ada Pengurangan sebesar Rp 30.878.061,00 yaitu dari Barang Bukan Aset sebesar Rp. 26.878.061,00, Reklas ke Gedung Bangunan sebesar Rp. 4.000.000,00 sehingga saldo Akhir Peralatan Mesin sebesar Rp. 4.780.561.619,12.
- **Puskesmas Sungai Besar** saldo awal Rp.3.770.482.907,05 ada Penambahan sebesar Rp. 80.329.130,00 dari Belanja Modal Rp. 59.481.269,00 dan Mutasi masuk sebesar Rp. 20.847.861,00, ada Pengurangan sebesar Rp. 20.590.061,00 dari Barang Bukan Aset sebesar



## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Rp. 12.590.061,00 dan Mutasi Keluar sebesar Rp.8.000.000,00 sehingga saldo Akhir Peralatan Mesin sebesar Rp.3.830.221.976,05.

- **Puskesmas Cempaka** saldo awal Rp. 5.879.865.660,30 ada Penambahan sebesar Rp. 220.234.905,00 dari Belanja Modal Rp. 134.651.424,00 dan Mutasi Masuk Rp. 85.583.481,00 dan ada Pengurangan sebesar Rp. 59.399.603,05 dari Barang Bukan Aset Rp.15.424.061,00 Penghapusan Rp.43.975.542,05 sehingga saldo Akhir Peralatan Mesin Rp. 6.040.700.962,25.
- **Puskesmas Guntung Payung** saldo awal Rp. 4.155.373.252,67 ada Penambahan sebesar Rp.39.492.626,00 dari Belanja Modal Rp. 8.924.765,00 dan Mutasi Masuk Rp. 30.567.861,00, ada Pengurangan sebesar Rp.13.303.826,00 Barang Bukan Aset Rp. 6.553.826,00, Reklas ke Gedung Bangunan Rp.6.750.000,00 sehingga saldo akhir Peralatan Mesin sebesar Rp. 4.181.562.052,67.
- **Puskesmas Landasan Ulin** saldo awal Rp. 3.486.771.201,59 ada Penambahan sebesar Rp.191.775.261,00 dari Belanja Modal Rp. 161.207.400,00, Mutasi Masuk sebesar Rp. 30.567.861,00, ada Pengurangan sebesar Rp. 26.935.311,00 dari Barang Bukan Aset Rp.4.379.061,00, Reklas ke Gedung Bangunan Rp.22.556.250,00 sehingga saldo akhir Peralatan Mesin sebesar Rp.3.651.661.151,59.
- **Puskesmas Liang Anggang** saldo awal Rp. 4.925.402.216,93 ada Penambahan sebesar Rp.175.127.032,00 dari Belanja Modal Rp. 29.082.695,00, Reklas ke Barang Jasa sebesar Rp. 312.000,00 dan Mutasi masuk Rp.153.367.861,00, ada Pengurangan sebesar Rp. 8.889.061,00 dari Barang Bukan Aset Rp.10.000.000,00 sehingga saldo akhir Peralatan Mesin sebesar Rp. 5.091.640.187,93.
- **Puskesmas Sungai Ulin** saldo awal Rp.4.669.774.499,72 ada Penambahan sebesar Rp. 59.962.556,00 dari Belanja Modal Rp.22.423.438,00 dan Mutasi Masuk Rp. 30.567.0861,00, ada Pengurangan sebesar Rp.65.532.720,00 dari Reklas ke barang jasa Rp.15.982.720,00 Barang Bukan Aset Rp.49.550.000,00 sehingga saldo akhir Peralatan Mesin sebesar Rp.4.441.630.993,72.
- **Puskesmas Guntung Manggis** saldo awal Rp. 4.340.591.936,25 ada Penambahan sebesar Rp. 78.697.151,00 dari Belanja Modal sebesar Rp 48.129.290,00 dan Mutasi masuk Rp. 30.567.0861,00, ada Pengurangan sebesar Rp.10.534.451,00 dari Barang Bukan Aset Rp.67.254.500,00 sehingga saldo akhir Peralatan Mesin sebesar Rp. 4.408.754.636,25.
- **Puskesmas Landasan Ulin Timur** saldo awal Rp. 3.095.534.421,69 ada Penambahan sebesar Rp.193.141.381,00 dari Mutasi Masuk, ada Pengurangan sebesar Rp.7.653.701,00 dari Barang Bukan Aset sehingga saldo akhir Peralatan Mesin sebesar Rp.3.281.022.101,69.

### 5.3.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
<u>70.338.958.003,30</u>	<u>69.704.954.739,30</u>



# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	URAIAN	GEDUNG BANGUNAN
1	Dinas Kesehatan	10.498.630.000,00
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	2.296.619.788,00
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	179.813.960,00
4	Puskesmas Sungai Besar	8.692.029.343,00
5	Puskesmas Cempaka	12.110.266.115,30
6	Puskesmas Guntung Payung	8.985.744.847,00
7	Puskesmas Landasan Ulin	2.857.926.235,00
8	Puskesmas Liang Anggang	7.683.301.092,00
9	Puskesmas Sungai Ulin	3.588.401.701,00
10	Puskesmas Guntung Manggis	4.896.094.298,00
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	8.550.130.624,00

A. Terdapat penambahan saldo Aset Tetap Gedung Bangunan 2022 sebesar Rp. 634.003.316,00

B. Rincian Pergerakan Aset tetap Gedung Bangunan sebagai berikut:

- **Dinas Kesehatan** saldo awal Rp.10.498.630.000,00 ada Penambahan sebesar Rp.59.706.900,00 dari Belanja Modal dan ada Pengurangan sebesar Rp.59.706.900,00 dari Mutasi Keluar sehingga saldo akhir Gedung Bangunan Rp.10.498.630.000,00.
- **Puskesmas Banjarbaru Utara** saldo awal Rp.2.161.661.788,00 ada Penambahan sebesar Rp.134.958.000,00 dari Belanja Modal sehingga saldo akhir Gedung Bangunan sebesar Rp.2.296.619.788,00.
- **Puskesmas Banjarbaru Selatan** saldo awal Rp.179.813.960,00 ada Penambahan sebesar Rp.4.000.000,00 dari Reklas dari Peralatan Mesin dan Pengurangan sebesar Rp.4.000.000,00 dari Barang Bukan Aset sebesar Rp.4.000.000,00 sehingga saldo akhir Gedung Bangunan sebesar Rp.179.813.960,00.
- **Puskesmas Sungai Besar** saldo awal Rp.8.672.31.229,00 ada Penambahan sebesar Rp.29.599.442,00 dari Belanja Modal dan Pengurangan sebesar Rp.10.001.328,00 dari Barang Bukan Aset sebesar Rp.8.401.328,00 dan Reklas ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp.1.600.000,00 sehingga saldo akhir Gedung Bangunan sebesar Rp.8.692.029.343,00.
- **Puskesmas Cempaka** saldo tetap
- **Puskesmas Guntung Payung** saldo awal Rp.8.985.744.847,00 ada Penambahan sebesar Rp.22.225.000,00 dari Belanja Modal sebesar Rp.15.475.000,00 dan Pengurangan sebesar Rp.22.225.000,00 dari Barang Bukan Aset sehingga saldo akhir Gedung Bangunan sebesar Rp.8.985.744.847,00.
- **Puskesmas Landasan Ulin** saldo awal Rp.2.790.369.985,00 ada Penambahan sebesar Rp.67.556.250,00 dari Belanja Modal sebesar Rp.45.000.000,00, dari Reklas dari Peralatan Mesin sebesar Rp.22.556.250,00 sehingga saldo akhir Gedung Bangunan sebesar Rp.2.857.926.235,00.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

- **Puskesmas Liang Anggang** saldo tetap
- **Puskesmas Sungai Ulin** saldo awal Rp.3.236.217.701,00 ada Penambahan sebesar Rp.352.184.000,00 dari Belanja Modal Rp.26.600.000,00 dan Rp.325.584.000,00 dari Hibah sehingga saldo akhir Gedung Bangunan Rp.3.588.401.701,00.
- **Puskesmas Guntung Manggis** saldo tetap
- **Puskesmas Landasan Ulin Timur** saldo awal Rp.8.490.423.724,00 ada Penambahan sebesar Rp.59.706.900,00 dari Mutasi Masuk Rp.26.600.000,00 sehingga saldo akhir Gedung Bangunan Rp.8.550.130.624,00.

#### 5.3.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022

(Rp)

**1.839.243.823,00**

31 Desember 2021

(Rp)

**1.839.243.823,00**

No.	URAIAN	JIJ
1	Dinas Kesehatan	533.036.000,00
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	22.113.322,00
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	52.715.275,00
4	Puskesmas Sungai Besar	22.113.322,00
5	Puskesmas Cempaka	102.447.571,00
6	Puskesmas Guntung Payung	71.343.322,00
7	Puskesmas Landasan Ulin	128.864.122,00
8	Puskesmas Liang Anggang	447.898.222,00
9	Puskesmas Sungai Ulin	180.989.345,00
10	Puskesmas Guntung Manggis	83.313.322,00
11	Puskesmas Landasan Ulin timur	194.410.000,00

A. **Penambahan Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp.0,00**

B. **Pengurangan Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2022 sebesar Rp.0,00**

C. **Rincian Pergerakan Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:**

- **Dinas Kesehatan** aset tetap JIJ tetap Rp.533.036.000,00
- **Puskesmas Banjarbaru Utara** aset JIJ tetap Rp.22.113.322,00
- **Puskesmas Banjarbaru Selatan** aset JIJ tetap Rp.52.715.275,00
- **Puskesmas Sungai Besar** aset awal JIJ sebesar Rp.22.113.322,00, ada Penambahan sebesar Rp.1.600.000,00 dari Reklas Gedung Bangunan dan Pengurangan sebesar Rp.1.600.000,00 dari Barang Bukan Aset sehingga saldo akhir JIJ sebesar Rp.22.113.322,00.
- **Puskesmas Cempaka** aset JIJ tetap Rp.102.447.571,00
- **Puskesmas Guntung Payung** aset JIJ tetap Rp.71.343.322,00



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

- **Puskesmas Landasan Ulin** aset JIJ tetap Rp.128.864.122,00
- **Puskesmas Liang Anggang** aset JIJ tetap Rp.447.898.222,00
- **Puskesmas Sungai Ulin** aset JIJ tetap Rp.180.989.345,00
- **Puskesmas Guntung Manggis** aset JIJ tetap Rp.83.313.322,00
- **Puskesmas Landasan Ulin Timur** aset JIJ tetap Rp.194.410.000,00.

**5.3.3.5 Aset Tetap Lainnya**

<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b> <b>784.329.999,96</b>	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b> <b>784.329.999,96</b>
---	---

No.	URAIAN	ASET TETAP LAINNYA
1	Dinas Kesehatan	533.036.000,00
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	39.764.444,44
3	Puskesmas Banjarbaru	39.764.444,44
4	Puskesmas Sungai Besar	224.854.444,44
5	Puskesmas Cempaka	44.714.444,44
6	Puskesmas Guntung Payung	226.794.444,44
7	Puskesmas Landasan Ulin	39.714.444,44
8	Puskesmas Liang Anggang	8.944.444,44
9	Puskesmas Sungai Ulin	39.764.444,44
10	Puskesmas Guntung Manggis	3.944.444,44
11	Puskesmas LAndasan Ulin timur	116.070.000,00

**A. Tidak ada perubahan Aset Tetap Lainnya tahun 2022.**

**5.3.3.6 Akumulasi Penyusutan**

<b>31 Desember 2022</b> <b>(Rp)</b> <b>(61.372.607.859,39)</b>	<b>31 Desember 2021</b> <b>(Rp)</b> <b>(55.115.965.886,20)</b>
--	--

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing berjumlah sebesar (Rp.61.372.607.859,39) dan (Rp.55.115.965.886,20). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun aset tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap selain untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan dan aset lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No	Uraian	2022	2021
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	(46.618.626.410,53)	(42.713.697.009,88)
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(13.808.609.619,88)	(11.630.886.063,94)
3	Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	(766.741.829,00)	(633.522.812,40)
4	Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya	(178.629.999,98)	(137.859.999,98)
	<b>TOTAL</b>	<b>(61.372.607.859,39)</b>	<b>(55.115.965.886,20)</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin :

No.	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN MESIN 2022
1	Dinas Kesehatan	(8.764.510.474,95)
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	(3.997.889.499,26)
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	(4.079.911.726,26)
4	Puskesmas Sungai Besar	(3.184.864.076,69)
5	Puskesmas Cempaka	(5.271.107.295,98)
6	Puskesmas Guntung Payung	(3.694.964.595,01)
7	Puskesmas Landasan Ulin	(3.128.932.899,36)
8	Puskesmas Liang Anggang	(4.532.290.811,92)
9	Puskesmas Sungai Ulin	(3.699.378.629,54)
10	Puskesmas Guntung Manggis	(3.800.502.103,75)
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	(2.475.216.796,57)

Rincian Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan :

No.	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN 2022
1	Dinas Kesehatan	(3.561.945.083,67)
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	(701.595.787,60)
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	(42.895.788,75)
4	Puskesmas Sungai Besar	(937.978.660,87)
5	Puskesmas Cempaka	(2.429.988.170,53)
6	Puskesmas Guntung Payung	(897.122.163,52)
7	Puskesmas Landasan Ulin	(904.394.472,90)
8	Puskesmas Liang Anggang	(1.569.261.517,28)
9	Puskesmas Sungai Ulin	(1.032.661.180,00)
10	Puskesmas Guntung Manggis	(866.884.727,33)
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	(863.882.067,43)



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Rincian Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan :

No.	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN 2022
1	Dinas Kesehatan	(227.737.950,00)
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	(6.633.996,00)
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	(18.617.939,35)
4	Puskesmas Sungai Besar	(6.633.996,00)
5	Puskesmas Cempaka	(29.826.209,80)
6	Puskesmas Guntung Payung	(29.129.498,20)
7	Puskesmas Landasan Ulin	(49.668.938,20)
8	Puskesmas Liang Anggang	(219.109.728,20)
9	Puskesmas Sungai Ulin	(63.999.575,05)
10	Puskesmas Guntung Manggis	(22.666.998,20)
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	(92.717.000,00)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya :

No.	URAIAN	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA 2022
1	Dinas Kesehatan	(0,00)
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	(76.305.555,56)
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	(3.944.444,44)
4	Puskesmas Sungai Besar	(34.714.444,44)
5	Puskesmas Cempaka	(44.714.444,44)
6	Puskesmas Guntung Payung	(3.944.444,44)
7	Puskesmas Landasan Ulin	(39.714.444,44)
8	Puskesmas Liang Anggang	(3.944.444,44)
9	Puskesmas Sungai Ulin	(3.944.444,44)
10	Puskesmas Guntung Manggis	(3.944.444,44)
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	(116.070.000,00)

### 5.3.5 Aset Lainnya

**31 Desember 2022**

**(Rp)**

**16.339.200,00**

**31 Desember 2021**

**(Rp)**

**83.355.478,27**

Aset lainnya merupakan aset tetap yang diusulkan untuk dihapus karena rusak berat dan dihentikan dari penggunaan termasuk di dalamnya saldo aset lain-lain. Saldo Aset Lain-Lain Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp. 16.339.200,00 dan Rp 83.355.478,27. Berikut ini rincian saldo Aset Lainnya Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

No.	URAIAN	Aset Lainnya
1	Dinas Kesehatan	15.296.400,00
2	Puskesmas Banjarbaru Utara	0,00
3	Puskesmas Banjarbaru Selatan	0,00
4	Puskesmas Sungai Besar	352.800,00
5	Puskesmas Cempaka	0,00
6	Puskesmas Guntung Payung	690.000,00
7	Puskesmas Landasan Ulin	0,00
8	Puskesmas Liang Anggang	0,00
9	Puskesmas Sungai Ulin	0,00
10	Puskesmas Guntung Manggis	0,00
11	Puskesmas Landasan Ulin Timur	0,00

**A. Pengurangan Aset Lainnya tahun 2022 sebesar Rp.67.016.278,27**

Berikut rincian perhitungan saldo akhir aset lainnya rusak berat :

<b>Dinas Kesehatan</b>		
No.	Uraian	KDP (Rp)
1.	Saldo per 31 Desember 2021	492.340.184,99
	<b>Pengurangan :</b>	
2.	Penghapusan	250.352.660,99
3.	Akumulasi penyusutan	226.691.124,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>15.296.400,00</b>
<b>Puskesmas Sungai Besar</b>		
1.	Saldo per 31 Desember 2021	241.465.450,62
	<b>Pengurangan :</b>	
2.	Penghapusan	15.699.058,02
3.	Akumulasi penyusutan	225.413.592,60
	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>352.800,00</b>
<b>Puskesmas Guntung Payung</b>		
1.	Saldo per 31 Desember 2021	152.672.646,74
	<b>Pengurangan :</b>	
2.	Penghapusan	41.388.037,74
3.	Akumulasi penyusutan	110.594.609,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>690.000,00</b>
<b>Puskesmas Liang Anggang</b>		
1.	Saldo per 31 Desember 2021	144.415.426,52
	<b>Pengurangan :</b>	
2.	Penghapusan	54.613.182,52
3.	Akumulasi penyusutan	89.802.244,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>0,00</b>
<b>Puskesmas Banjarbaru Selatan</b>		
1.	Saldo per 31 Desember 2021	287.548.000,00
	<b>Pengurangan :</b>	
2.	Penghapusan	63.948.000,00
3.	Akumulasi penyusutan	223.600.000,00



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>0,00</b>
	<b>Puskesmas Banjarbaru Utara</b>	
1.	Saldo per 31 Desember 2021	199.962.786,20
	<b>Pengurangan :</b>	
2.	Penghapusan	44.962.786,20
3.	Akumulasi penyusutan	155.000.000,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>0,00</b>
	<b>Puskesmas Sungai Ulin</b>	
1.	Saldo per 31 Desember 2021	17.896.368,00
	<b>Penambahan :</b>	
	Reklas dari Peralatan Mesin	45.703.500,00
	<b>Pengurangan :</b>	
2.	Penghapusan	17.896.368,00
3.	Akumulasi penyusutan	45.703.500,00
	<b>Saldo per 31 Desember 2022</b>	<b>0,00</b>

Berikut rincian penghapusan aset lainnya rusak berat :

1. **Dinas Kesehatan**

1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	1.100.000,00
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	1.105.000,00
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	5.280.000,00
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	5.280.000,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	3.741.666,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	4.000.000,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	4.000.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Note Book	12.150.000,00
1.3.2.05.01.05.088	Printer	1.365.254,00
1.5.4.01.01.01.002	P.C Unit	7.062.500,00
1.5.4.01.01.01.002	Filing Cabinet Besi	12.441.667,00
1.3.2.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	6.875.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Note Book	1.656.250,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.750.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.750.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.750.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.750.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.500.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.500.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.500.000,00
1.3.2.10.01.02.003	Note Book	11.651.000,00
1.3.2.05.01.05.088	Laptop	11.917.500,00
1.3.2.05.01.05.088	Laptop	11.917.500,00
1.5.4.01.01.01.002	Alat Penghancur Kertas	12.351.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Filing Cabinet Besi	12.400.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Laptop	12.500.000,00



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

1.5.4.01.01.01.002	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.350.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.400.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.400.000,00
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.338.850,00
1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	4.800.000,00
1.3.2.05.01.05.002	CCTV - Camera Control Television System	4.800.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Camera Film	5.500.000,00
1.3.2.10.01.02.002	Laptop	10.214.998,00
1.3.2.10.01.02.003	Note Book	12.475.000,00
1.3.2.10.01.02.003	Note Book	12.587.500,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.500.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.500.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.584.260,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.391.708,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2.723.602,99
1.3.2.10.01.02.002	Laptop	11.381.588,00
1.3.2.10.01.02.002	Laptop	12.500.000,00
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.349.198,00
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.650.000,00
1.3.2.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3.611.619,00
	<b>Total</b>	<b>250.352.660,99</b>

### 2. Puskesmas Sungai Besar

1.5.4.01.01.01.002	LCD Projector/Infocus	5.000.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Uninterruptible Power Supply (UPS)	1.400.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.920.630,70
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.103.787,32
1.5.4.01.01.01.002	Timbangan Barang	1.213.900,00
1.5.4.01.01.01.002	Timbangan Barang	1.213.900,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.846.840,00
	<b>Total</b>	<b>15.699.058,02</b>

### 3. Puskesmas Guntung Payung

1.5.4.01.01.01.002	Kursi Besi/Metal	7.503.770,00
1.5.4.01.01.01.002	Timbangan Barang	1.880.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1.750.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Kipas Angin	4.928.571,00
1.5.4.01.01.01.002	P.C Unit	8.400.000,00
1.5.4.01.01.01.002	P.C Unit	1.750.000,00
1.5.4.01.01.01.002	P.C Unit	5.160.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.094.654,75
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.094.654,75
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81
1.5.4.01.01.01.002	Lampu	1.800.000,00
	<b>Total</b>	<b>41.388.037,74</b>

#### 4. Puskesmas Liang Anggang

1.5.4.01.01.01.002	Tensimeter	2.646.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81
1.5.4.01.01.01.002	Laptop	10.750.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Tensimeter	2.646.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.900.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Tensimeter	1.600.501,00
1.5.4.01.01.01.002	Tensimeter	1.600.501,00
1.5.4.01.01.01.002	Tensimeter	2.646.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Tensimeter	2.646.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.900.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.875.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	1.006.596,81
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.349.198,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.349.198,00
1.5.4.01.01.01.002	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1.349.198,00
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.130.399,76
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.130.399,76
1.5.4.01.01.01.002	Blood Presure Meter/Tensimeter	2.130.399,76
	<b>Total</b>	<b>54.613.182,52</b>

#### 5. Puskesmas Banjarbaru Selatan

1.5.4.01.01.01.002	Emergency Kit	44.950.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inchi)	2.000.000,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	3.870.000,00
1.5.4.01.01.01.002	P.C Unit	8.500.000,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	4.628.000,00
	<b>Total</b>	<b>63.948.000,00</b>

#### 6. Puskesmas Banjarbaru Utara

1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	4.420.000,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	4.500.000,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	7.740.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Mesin Absen (Time Recorder)	7.100.000,00



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

1.5.4.01.01.01.002	Lap Top	12.001.250,00
1.5.4.01.01.01.002	Mesin Absensi	8.000.000,00
1.5.4.01.01.01.002	Examination Lamp	1.201.536,20
	<b>Total</b>	<b>44.962.786,20</b>

### 7. Puskesmas Sungai Ulin

1.5.4.01.01.01.002	P.C Unit	5.726.368,00
1.5.4.01.01.01.002	A.C. Split	3.870.000,00
1.5.4.01.01.01.002	P.C Unit	8.300.000,00
	<b>Total</b>	<b>17.896.368,00</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

### 5.3.3 Kewajiban

31 Desember 2022

(Rp)

**82.259.346,00**

31 Desember 2021

(Rp)

**130.512.907,00**

(Rupiah)

No	Uraian	2022	2021
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.017.541,00	44.910.141,00
2.	Utang Beban	77.241.805,00	85.602.766,00
<b>Jumlah</b>		<b>82.259.346,00</b>	<b>130.512.907,00</b>

### Rincian Utang Beban

	Listrik	Air	Total
Dinas Kesehatan	24.633.610	3.303.000	<b>27.936.610</b>
Puskesmas Banjarbaru Utara	3.303.646	179.600	<b>3.483.246</b>
Puskesmas Banjarbaru Selatan	3.184.100	1.384.700	<b>4.568.800</b>
Puskesmas Sungai Besar	3.700.142	1.588.100	<b>5.288.242</b>
Puskesmas Rawat Inap Cempaka	5.763.321	672.800	<b>6.436.121</b>
Puskesmas Liang Anggang	3.178.126	1.230.100	<b>4.408.226</b>
Puskesmas Landasan Ulin	2.238.575	532.000	<b>2.770.575</b>
Puskesmas Sungai Ulin	3.721.587	11.500	<b>3.733.087</b>
Puskesmas Guntung Payung	6.605.241	330.000	<b>6.935.241</b>
Puskesmas Guntung Manggis	2.656.170	1.246.700	<b>3.902.870</b>
Puskesmas Landasan Ulin Timur	7.111.687	667.100	<b>7.778.787</b>
<b>Total</b>	<b>66.096.205</b>	<b>11.145.600</b>	<b>77.241.805</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

**5.4 LAPORAN OPERASIONAL**

**5.4.1 Pendapatan-LO**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>12.097.518.515,87</b>	<b>10.446.281.152,39</b>

Saldo Pendapatan-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.12.097.518.515,87 dan Rp.10.446.281.152,39, saldo ini meningkat dibanding tahun 2021 yaitu sebesar Rp.1.651.237.363,48. Meningkatnya saldo Pendapatan-LO disebabkan adanya pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi. Berikut ini rincian Pendapatan-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

**Rincian Pendapatan-LO**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	8.263.539.205,87	7.723.957.387,39	539.581.818,48
2	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	3.833.979.310,00	2.722.323.765,00	1.111.655.545,00
<b>TOTAL</b>		<b>12.097.518.515,87</b>	<b>10.446.281.152,39</b>	<b>1.651.237.363,48</b>

**5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>8.263.539.205,87</b>	<b>7.723.957.387,39</b>

Saldo Pendapatan Asli Daerah-LO pada tahun 2022 sebesar Rp.8.263.539.205,87 yang terdiri dari retribusi daerah sebesar Rp.0,00 dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.8.263.539.205,87 dengan rincian sebagai berikut:

**Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Retribusi Daerah - LO	0,00	13.115.500,00	(13.115.500,00)
2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	8.263.539.205,87	7.710.841.887,39	552.697.318,48
<b>TOTAL</b>		<b>8.263.539.205,87</b>	<b>7.723.957.387,39</b>	<b>539.581.818,48</b>

**5.4.1.1.1 Retribusi Daerah-LO**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>0,00</b>	<b>13.115.500,00</b>

**5.4.1.2 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3.833.979.310,00</b>	<b>2.722.323.765,00</b>

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber lain yang tidak bersifat rutin dan insidental, posisi Lain Lain Pendapatan daerah yang sah – LO Pemerintah.

**Rincian Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO**

No	Keterangan	Saldo Tahun 2022	Saldo tahun 2021	Kenaikan (Penurunan)	%
1	Pendapatan Hibah-LO	3.833.979.310,00	2.722.323.765,00	1.111.655.545,00	40,83
<b>TOTAL</b>		<b>3.833.979.310,00</b>	<b>2.722.323.765,00</b>	<b>1.111.655.545,00</b>	<b>40,83</b>

**5.4.1.2.1 Pendapatan Hibah – LO**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>3.833.979.310,00</b>	<b>2.722.323.765,00</b>

Saldo Pendapatan Hibah-LO berasal dari aktivitas hibah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp.3.833.979.310,00 terdiri dari hibah obat-obatan, obat, tanah, gedung dan bangunan. Berikut rincian pendapatan Hibah-LO:

NO.	URAIAN	2022 (Rp)
1.	Hibah Obat-Obatan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	129.090.000,00
2.	Hibah Tanah Puskesmas Sungai Ulin	100.000.000,00
3.	Hibah Gedung dan Bangunan Puskesmas Sungai Ulin	325.584.000,00
4.	Hibah Obat dari Pemerintah Provinsi	3.279.305.310,00
<b>TOTAL</b>		<b>3.833.979.310,00</b>



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5.4.2 **Beban-LO**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>102.807.313.117,38</b>	<b>117.441.449.147,32</b>

Saldo Beban-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.102.807.313.117,38 dan Rp.117.441.449.147,32. Saldo Beban-LO mengalami penurunan sebesar Rp.14.634.136.029,94. Berikut rincian Beban Operasi Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun 2022:

**Rincian Beban Operasi**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Beban Pegawai	48.517.995.657,00	63.222.141.248,00	(14.704.145.591,00)
2	Beban Persediaan	15.636.866.600,00	13.263.787.332,00	2.373.079.268,00
3	Beban Jasa	28.183.086.698,00	29.891.198.002,92	(1.708.111.304,92)
4	Beban Pemeliharaan	229.560.469,00	193.867.050,00	35.693.419,00
5	Beban Perjalanan Dinas	3.411.470.759,00	2.728.928.719,00	682.542.040,00
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.828.332.934,38	8.141.526.795,40	(1.313.193.861,02)
<b>TOTAL</b>		<b>102.807.313.117,38</b>	<b>117.441.449.147,32</b>	<b>(14.634.136.029,94)</b>

Beban Pegawai-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.48.517.995.657,00 dan Rp.63.222.141.248,00. Berikut rincian Beban Pegawai-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

**Rincian Beban Pegawai**

No.	Sub Unit	2022 (Rp)
1	Beban Gaji Pokok PNS	26.770.719.150,00
2	Beban Tunjangan Keluarga PNS	1.703.770.934,00
3	Beban Tunjangan Jabatan PNS	92.145.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	2.968.167.100,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	269.685.000,00
6	Beban Tunjangan Beras PNS	1.295.666.220,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	39.345.246,00
8	Beban Pembulatan Gaji PNS	406.538,00
9	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	15.143.071.094,00
10	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	500.000,00
11	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	24.570.000,00
12	Beban Pegawai BLUD	209.949.375,00
<b>TOTAL</b>		<b>48.517.995.657,00</b>



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Persediaan-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.12.467.301.787,00 dan Rp.13.263.787.332,00 berasal dari Belanja Persediaan-LRA, Mutasi Masuk Persediaan antar SKPD, Reklas Dari Belanja BLUD, Reklas dari Belanja Modal, Penyesuaian Sisa Persediaan dan Mutasi Keluar Persediaan antar SKPD. Berikut ini rincian beban Persediaan-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

### Rincian Beban Persediaan

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)
8.1.2.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	26.248.110,00
8.1.2.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	241.582.835,00
8.1.2.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	316.156.022,00
8.1.2.01.01.0009	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	30.000,00
8.1.2.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	4.279.998,00
8.1.2.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	116.199.600,00
8.1.2.01.01.0013	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	71.401.796,00
8.1.2.01.01.0015	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	445.962.875,00
8.1.2.01.01.0016	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	22.736.011,00
8.1.2.01.01.0023	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	159.000,00
8.1.2.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1.026.042.248,00
8.1.2.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.429.528.435,00
8.1.2.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	20.340.000,00
8.1.2.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	270.192.500,00
8.1.2.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	110.653.600,00
8.1.2.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	67.900.500,00
8.1.2.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	24.830.000,00
8.1.2.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Souvenir/Cendera Mata	4.000.000,00
8.1.2.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	187.045.076,00
8.1.2.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	5.067.019.926,00
8.1.2.01.01.0038	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.861.264.025,00
8.1.2.01.01.0039	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.358.000,00
8.1.2.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	67.566.100,00
8.1.2.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	1.834.271.000,00
8.1.2.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	142.878.200,00
8.1.2.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	857.758.000,00
8.1.2.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.201.492.000,00
8.1.2.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	15.835.000,00
8.1.2.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	61.989.000,00
8.1.2.01.01.0071	Beban Pakaian Kerja Laboratorium	109.751.743,00
8.1.2.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	30.395.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>15.636.866.600,00</b>



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

## Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

Beban Jasa Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.28.183.086.698,00 dan Rp.29.891.198.002,92. Beban Jasa-LO pada tahun 2022 berasal dari Belanja Jasa-LRA serta perhitungan beban utang tahun 2021 dan 2022, berikut ini perhitungan Beban Jasa-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada tahun 2022:

### Rincian Beban Jasa

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)
8.1.2.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	542.225.000,00
8.1.2.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	652.200.000,00
8.1.2.02.01.0006	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	75.000.000,00
8.1.2.02.01.0014	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	2.830.545.000,00
8.1.2.02.01.0015	Beban Jasa Tenaga Laboratorium	131.290.000,00
8.1.2.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	30.750.000,00
8.1.2.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	1.223.940.000,00
8.1.2.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	202.140.000,00
8.1.2.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	1.489.091.351,00
8.1.2.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	289.300.000,00
8.1.2.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	237.600.000,00
8.1.2.02.01.0033	Beban Jasa Tenaga Supir	120.860.000,00
8.1.2.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.000.000,00
8.1.2.02.01.0045	Beban Jasa Pelayanan Kearsipan	13.200.000,00
8.1.2.02.01.0049	Beban Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	5.410.000,00
8.1.2.02.01.0051	Beban Jasa Pengolahan Sampah	157.344.000,00
8.1.2.02.01.0055	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	66.600.000,00
8.1.2.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.683.364,00
8.1.2.02.01.0060	Beban Tagihan Air	94.825.230,00
8.1.2.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	748.701.130,00
8.1.2.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	6.840.000,00
8.1.2.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	207.163.252,00
8.1.2.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.091.300,00
8.1.2.02.02.0003	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	11.575.803.667,00
8.1.2.02.02.0004	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	818.011.500,00
8.1.2.02.02.0006	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.045.600,00
8.1.2.02.04.0034	Beban Sewa Alat Bantu Lainnya	2.500.000,00
8.1.2.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	22.164.000,00
8.1.2.02.04.0118	Beban Sewa Mebel	750.000,00
8.1.2.02.04.0123	Beban Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	4.600.000,00
8.1.2.02.04.0132	Beban Sewa Peralatan Studio Audio	1.500.000,00
8.1.2.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.000.000,00
	<b>TOTAL BELANJA JASA LRA</b>	<b>21.583.078.342,00</b>
	Beban Utang Jasa 2021	(74.145.753,00)



## Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

	Beban Utang Jasa 2022	77.241.805,00
8.1.2.99.99.9999	Beban Barang dan Jasa BLUD	6.576.312.304,00
	<b>TOTAL BEBAN JASA LO</b>	<b>28.183.086.698,00</b>

Beban Pemeliharaan-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.229.560.469,00 dan Rp.193.867.050,00. Berikut rincian beban Pemeliharaan-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

### Rincian Beban Pemeliharaan

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)
8.1.2.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	22.981.600,00
8.1.2.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	6.000.000,00
8.1.2.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2.000.000,00
8.1.2.03.02.0040	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	500.000,00
8.1.2.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	11.250.000,00
8.1.2.03.02.0145	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	1.750.000,00
8.1.2.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	5.850.000,00
8.1.2.03.02.0409	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	9.000.000,00
8.1.2.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	22.598.869,00
8.1.2.03.04.0118	Beban Jasa Pengolahan Sampah	147.630.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>229.560.469,00</b>

Beban Perjalanan Dinas-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.3.411.470.759,00 dan Rp.2.728.928.719,00. Berikut rincian beban Perjalanan Dinas-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

### Rincian Beban Perjalanan Dinas

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)
8.1.2.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	588.191.759,00
8.1.2.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.823.279.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>3.411.470.759,00</b>

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp.6.822.861.684,38 dan Rp.8.141.526.795,40. Berikut rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru per 31 Desember 2022:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

**Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

KODE REKENING	URAIAN	2022 (Rp)
8.2.1.01.01.0001	Beban Penyusutan Tractor	4.900.524.955,38
8.2.2.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	1.799.011.626,00
8.2.3.01.01.0001	Beban Penyusutan Jalan Nasional	128.796.353,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.828.332.934,38</b>

**5.4.2.1.1 Surplus/Defisit-LO**

31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
<b>(90.709.794.601,51)</b>	<b>(106.995.167.994,93)</b>

**KEGIATAN NON OPERASIONAL****Rincian Kegiatan Non Operasional**

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (%)
1	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	62.759.987,13	179.302.272,39	116.542.285,26
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(62.759.987,13)</b>	<b>(179.302.272,39)</b>	<b>(116.542.285,26)</b>

Kegiatan Non Operasional berasal dari aktivitas penghapusan nilai buku karena adanya pengurangan aset lainnya – rusak berat sebesar Rp.62.759.987,13 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Sub Unit	2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	33.268.888,99
2	Puskesmas Liang Anggang	9.330.792,51
3	Puskesmas Guntung Payung	5.442.278,70
4	Puskesmas Banjarbaru Utara	4.620.000,00
5	Puskesmas Banjarbaru Selatan	4.476.800,00
6	Puskesmas Sungai Besar	5.621.226,93
	<b>TOTAL</b>	<b>62.759.987,13</b>

**RINGKASAN LO**

<b>Pendapatan-LO</b>	<b>12.097.518.515,87</b>
<b>Beban</b>	<b>102.807.313.117,38</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Operasi</b>	<b>(90.709.794.601,51)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>	<b>62.759.987,13</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>(62.759.987,13)</b>
<b>Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa</b>	<b>(90.772.554.588,64)</b>
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>0,00</b>
<b>Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa</b>	<b>(90.772.554.588,64)</b>



## **5.5 LAPORAN ARUS KAS**

### **5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai Aktivitas Operasional.

### **5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi /Investasi Aset non Keuangan**

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas dari Aktivitas Investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

### **5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang. Aktivitas ini menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memanfaatkan surplus atau menutup defisit anggaran.

### **5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran kas ini terjadi sehubungan dengan adanya potongan atau pungutan oleh Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya. Uang yang dipungut atau dipotong dari pembayaran yang dilakukan pemerintah ini bukan hak Pemerintah Daerah tetapi merupakan milik pihak ketiga.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Uraian	2022	2021
Ekuitas Awal	106.919.708.880,22	95.678.548.711,72
Surplus/Defisit-LO	(90.772.554.588,64)	(107.174.470.267,32)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	(208.111.644,00)	(1.609.088.345,82)
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	85.137.418.297,00	116.806.542.090,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>101.076.460.944,58</b>	<b>106.919.708.880,22</b>

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atas penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fungsi Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca yang menerangkan tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan serta koreksi-koreksi yang terjadi atas kejadian pada tahun pelaporan sebelumnya baik karena aktifitas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru maupun perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi nilai Ekuitas BPKAD Kota Banjarbaru.

Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.100.961.983.180,58, bila dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya sebesar Rp.106.919.708.880,22 mengalami penurunan sebesar Rp.5.957.725.699,64.

5.6.1 Ekuitas Awal

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
<u>106.919.708.880,22</u>	<u>95.678.548.711,72</u>

Ekuitas awal tahun 2022 sebesar Rp.106.919.708.880,22 berasal dari saldo Ekuitas akhir per 31 Desember 2021.

5.6.2 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
<u>(90.772.554.588,64)</u>	<u>(107.174.470.267,32)</u>

Surplus/defisit-LO Dinas Kesehatan tahun 2022 sebesar Rp. 90.772.554.588,64, didapat dari laporan operasional (LO).



**Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**  
**Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021**

**5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar**

Koreksi Ekuitas pada tahun 2022 mengakibatkan penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp.1.400.976.701,82 besar koreksi Ekuitas pada Tahun Anggaran 2022 merupakan Koreksi Ekuitas atas nilai Akumulasi Penyusutan selama Tahun Anggaran 2022, dengan perincian sebagai berikut :

**5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(208.111.644,00)</b>	<b>(1.609.088.345,82)</b>

Koreksi ekuitas pada Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebesar (Rp.208.111.644,00), berasal dari jurnal penyesuaian mutasi masuk aset lancar disisi kredit, mutasi keluar aset lancar disisi debit, jurnal penyesuaian atas barang bukan aset / ekstrakomptabel aset tetap, koreksi lebih catat dan kurang catat serta jurnal akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2022.

**5.6.4 Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(85.137.418.297,00)</b>	<b>(116.806.542.090,00)</b>

Koreksi Nilai Kewajiban untuk Dikonsolidasikan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru pada Tahun 2022 senilai (Rp 85.137.418.297,00).

**5.6.5 Ekuitas Akhir**

<b>31 Desember 2022</b>	<b>31 Desember 2021</b>
<b>(Rp)</b>	<b>(Rp)</b>
<b>(101.076.460.944,58)</b>	<b>(106.919.708.880,22)</b>

Ekuitas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.101.076.460.944,58, bila dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya sebesar Rp.106.919.708.880,22 mengalami penurunan sebesar Rp.5.843.247.935,64.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

## BAB VI

### PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan sistem akuntansi berbasis komputer yaitu Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. *Output* yang dihasilkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014. Neraca merupakan sub sistem keuangan yang terpisah dari SIKD. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan konversi laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan merujuk kepada Buletin Teknis No.3 Tahun 2011 tentang Penyajian Laporan Keuangan Daerah sesuai SAP dengan konversi yang dikeluarkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---

### BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2022 telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan prinsip penyajian paripurna (*full disclosure*), Laporan Keuangan ini telah disajikan secara penuh atas semua transaksi maupun kejadian yang berpengaruh dan dimungkinkan mempengaruhi posisi keuangan saat ini ataupun nanti.

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru dalam penyampaian Laporan Keuangan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa penyajian Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna, meskipun upaya pengendalian terkait dengan hasil penyusunan Laporan Keuangan ini telah kami lakukan dan kami antisipasi jauh-jauh hari sebelumnya, tidak menutup kemungkinan masih banyak hal yang harus kami perbaiki dalam periode penyusunan Laporan Keuangan berikutnya.

Seluruh hasil pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun 2021 disajikan sesuai dengan kondisi obyektif dan diharapkan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan umum selanjutnya. Dengan segala kekurangannya, kami meyakini bahwa pengelolaan keuangan tahun 2022 secara umum telah memenuhi target dan sasaran pengelolaan.

Kami berharap dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru tahun 2022, pengungkapan yang kami sajikan dalam Laporan Keuangan ini, dapat lebih berguna bagi stakeholder dan seluruh pihak yang berkepentingan. Untuk perbaikan penyajian, masukan dan saran selalu kami harapkan khususnya demi peningkatan kualitas pengelolaan dan akuntabilitas Pemerintah Kota Banjarbaru di masa yang akan datang.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan bimbingan dan meridhoi upaya yang telah kami lakukan, untuk mewujudkan akuntabilitas dan tata kelola Pemerintah Kota Banjarbaru yang lebih baik.

**Banjarbaru, 31 Desember 2022**

Kepala Dinas

dr. Juhai Triyanti Agustina, M.Mkes

NIP. 19740818 200604 2 025



Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru

# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 dan 2021

---